

GERAKAN EKOFEMINISME

(Studi kasus Gerakan Perempuan Pungkat Bersatu di Desa Pungkat,
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam menolak Perusahaan
Kelapa Sawit)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Minat Utama Governance dan Transisi

Oleh:

Luqman Nur Hakim

NIM. 135120501111001



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

GERAKAN EKO FEMINISME
(Studi kasus Gerakan Perempuan Pungkat di Desa Pungkat, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam menolak Perusahaan Kelapa Sawit)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini, penulis ingin mengetahui strategi apa yang digunakan perempuan Pungkat dalam menolak keberadaan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan sesuai dengan fakta dilapangan. Penelitian ini menggunakan teori Ekofeminisme sebagai acuan gerakan perempuan, dan Teori Mobilisasi Sumber Daya sebagai acuan strategi yang digunakan di dalamnya. Dalam penelitian penulis akan mengupas sisi strategi yang digunakan Perempuan dalam menolak keberadaan perusahaan serta output yang didapatkan dari gerakan tersebut. Hasilnya, strategi yang digunakan Perempuan Pungkat dalam gerakannya, dapat dijawab oleh McAdam dalam Teori Mobilisasi Sumberdaya nya. McAdam berpendapat ada tiga faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu gerakan yaitu Penguatan Organisasi, Pembebasan Kognitif dan membuka peluang Politik. Hasilnya, gerakan ini di inisiatif oleh Perempuan Pungkat yang merasa gelisah akibat rusaknya hutan mereka. Para perempuan percaya bahwa hutan merupakan sumber kehidupan yang diberikan Tuhan untuk manusia dan sepatutnya dijaga. Mereka percaya bahwa Tuhan memberikan sumber rezeki mereka melalui hutan yang mereka miliki. Hasil dari gerakan tersebut diantaranya perusahaan diminta oleh pemerintah untuk berhenti sementara waktu, serta Desa ini menjadi panutan atas Desa lainnya yang memiliki kasus serupa. Pengalaman biologis dan psikologis yang dimiliki perempuan terhadap alam, membuat keduanya seperti mitra yang tak dapat dipisahkan. Ketika manusia ingin menciptakan bumi yang indah, maka perempuan punya cara khusus untuk melakukannya. Manusia akan memiliki masa depan dimana Perempuan akan memimpin jalan untuk berdamai dengan bumi, tidak dengan kaum maskulin yang akan menambah hal buruk terhadap bumi.

Kata Kunci: Ekofeminisme, Gerakan Sosial, Mobilisasi Sumberdaya

ECOFEMINISM MOVEMENT

(Case Study of Pungkat Women Movement in Pungkat Village, Indragiri Hilir Regency, Riau Province, in refusing Oil Palm Company)

Abstract

The purpose of this research, the author wants to know what strategy women Pungkat in refusing to reject the company. This research uses the method descriptive and qualitative approaches, to obtain systematic and research results in accordance with the facts in the field. This research uses the theory of Ecofeminism as a reference women's movement, and Resource Mobilization Theory as a reference strategy that is inside it. In the study the author will describe of the other side of the strategy that Women in releasing the information and output found from that movement. The result, the strategy of the Pungkat Woman in their movement, can be answered by McAdam in his Resource Mobilization Theory. McAdamgrad has three factors needed in the victory of movement, they are Strengthening Organization, Liberation Cognitive and open opportunities Politics. As a result, the movement is initiated by Pungkat Women who feel uneasy about the destruction of their forests. Women believe that forests are the source of life that god gives to man and is duly safeguarded. They believe that God provides their source of sustenance through the forest they have. The results of the movement include companies requested by the government to stop temporarily, and this village becomes a model for other villages that have similar cases. Women's biological and psychological experiences to nature, making both of them like partners that can not be submitted. When humans want creating a beautiful earth, so women has a special way of doing it. Man will hold a future where Women will lead the way to peace With the earth, not with the masculine who will add bad things to the earth

Keywords: Ecofeminism, social movement, Resource Mobilization Theory.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan Rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul GERAKAN EKOFEMINISME (Studi kasus Strategi Gerakan Perempuan Pungkat Bersatu di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam menolak Perusahaan Kelapa Sawit). Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang.

Dengan selesainya Skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga dan Kedua orang tua Ayahanda Sujiono ST, Ibunda Elly Rahmawati dan juga adik Achmad Rian Abimanyu yang selalu mendukung serta memberikan doa dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan laporan ini.
2. Ibu Juwita Hayyuning Prastiwi S.IP, M.IP dan Bapak Tri Hendra Wahyudi S.IP, M.IP sebagai dosen pembimbing dalam Skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang baik kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, juga karyawan/karyawati program studi Ilmu Politik.

4. Masyarakat Desa Pungkat, terutama Cik Masniar dan Cik Hernawati, sebagai Masyarakat dan perempuan tangguh dan sangat menginspirasi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Fandi Rahman sebagai staf dari Walhi Riau, yang selalu membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf Walhi Riau yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
7. Seluruh teman-teman Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang saling memberikan dukungan, masukan, kritik dan juga semangat satu sama lain, yang tidak bisa disampaikan penulis satu-persatu dalam laporan ini.
8. Bapak Parwoto dan Ibu Narsun Sukarlin yang telah memberikan semangat, doa serta masukan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Yosi Vilantina yang sudah memberikan kritik, saran, masukan terbaik dan semangat serta motivasi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, serta berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk siapapun yang mau berjuang dalam melestarikan lingkungan dan ketidakadilan.

Malang, 18 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR BAGAN	IV
DAFTAR TABEL.....	V
DAFTAR ISTILAH	VI
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. PERTANYAAN PENELITIAN	10
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	10
1.4. MANFAAT PENELITIAN	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. KAJIAN TEORITIS	12
2.2. TEORI MOBILISASI SUMBERDAYA	12
2.3. EKO FEMINISME	21
2.3.1 Akar Gerakan Ekofeminsme	29
2.3.2. Tipologi Ekofeminisme.....	30
2.4 Penelitian Terdahulu	34
2.5 Kerangka Pemikiran.....	38
BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Jenis, Tipe dan Pendekatan Penelitian	40
3.2. Fokus Penelitian.....	41
3.3. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	42
3.4. Teknik Pemilihan Informan	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Analisis Data	45
3.7 Keabsahan Data	46
BAB IV	48
GAMBARAN UMUM	48
4.1. Profil Desa Pungkat	48
4.1.1. Keadaan dan Mata Pencarian Masyarakat Pungkat	49
4.2. Profil Gerakan Perempuan Pungkat.....	52
4.3. Profil PT. SAL dan kronologis Kedatangannya ke Desa Pungkat.....	54
BAB V	60
HASIL PENELITIAN	60
5.1. Strategi Perempuan Pungkat dan Walhi dalam Menolak PT. SAL	63
5.1.1. Kekuatan Organisasi (<i>Organization Strength</i>).....	67
5.1.2. Pembebasan Kognitif (<i>Cognitif Liberation</i>)	72

5.1.3. Membuka peluang Politik (<i>Political Opportunities</i>)	75
5.1.4. Kaitan antara mobilisasi sumberdaya dan tindakan terorganisir	78
5.2. <i>Output</i> dari Gerakan Perempuan Pungkat terhadap Pemerintah Perusahaan dan bagi Masyarakat Desa	79
BAB VI	92
PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pengrajin kapal.....	50
Gambar 4.2 Pengolahan Kelapa di Desa Pungkat	51
Gambar 4.3 Persiapan Perempuan Pungkat Sebelum Aksi	53
Gambar 4.4 Lokasi PT. SAL di Areal Gambut Dalam	56
Gambar 5.1 Aksi Protes Perempuan Pungkat Menolak PT. SAL.....	70
Gambar 5.2 Diskusi Antara Perempuan Pungkat Menolak PT. SAL	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	20
Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran	39
Bagan 5.1 Strategi Perempuan Pungkat Dalam Menolak PT.SAL	77
Bagan 5.2	78
Bagan 5.3 Output Gerakan Perempuan Pungkat	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	31
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	35



DAFTAR ISTILAH

Gambut	: Jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk
Hektar	: Satuan luas yang umum dipakai untuk menyatakan luas tanah
Hutan rawa gambut	: Hutan dengan lahan basah yang tergenang yang biasanya terletak di belakang tanggul sungai
Hutan Produksi Konversi	: Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian dan perkebunan.
IUPHHK-HT	: Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Jikalahari	: Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam penyelamatan lingkungan khusus di daerah Riau.
Kanal	: Merupakan terusan air buatan manusia yang memotong melintasi tempat pembagian drainase air rawa.
Planologi	: Ilmu yang mempelajari sebuah wilayah atau kota beserta unsur yang ada didalamnya.
Pungkat	: Nama salah satu Desa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.
Rengkat	: Tempat atau wadah untuk membawa perbekalan makanan.
<i>Soil Taxonomy</i>	: Ilmu dalam klasifikasi terbentuknya tipe-tipe tanah.
Walhi	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, adalah organisasi lingkungan hidup independen, non-profit terbesar di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara Tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Pada akhir 1890-an Indonesia dikagumi sebagai paru-paru Dunia dengan Pulau Kalimantan sebagai sumber oksigen terbesar, kini mulai terancam pengawahatan serta alih fungsi hutan yang sangat memperhatikan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukkan sekitar 90 juta hektare pertambangan Indonesia dikuasai oleh asing yang diolah tanpa prosedur keamanan bagi lingkungan. Akibatnya, Indonesia telah kehilangan hutan sebanyak 96,5 juta hektare dari total 134 juta hektare hutan. Bukan hanya hutan, sampah juga bertebaran di mana-mana. Polusi udara dan air yang sudah diambang batas. Serta rusaknya keseimbangan ekologi akibat penambangan liar. Hal ini pulalah yang mengakibatkan bencana bertubi-tubi melanda bangsa ini.¹

Dalam pelaksanaannya pembukaan lahan untuk izin lokasi perkebunan tanaman hutan industri termasuk sawit, telah diatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut

¹Mansata Indah Dwi Utari, 2015, *Perempuan dan Penyelamatan Lingkungan*, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/perempuan-dan-penyelamatan-lingkungan/>, diakses pada 15 januari 2015, pukul 14.18.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan.²

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Permen 02/1999, Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah.³ Hal ini juga menjelaskan bahwa setiap pembukaan lahan juga harus memenuhi beberapa aspek sehingga tidak merusak hutan sebagai dampak dari pembukaan lahan perkebunan.

Sejak tahun 1982, luas jumlah hutan alam di Provinsi Riau mencapai hampir 7,6 juta hektar. Seiring berjalannya waktu hingga tahun 2015, luas hutan di Riau kini hanya mencapai 2,1 juta hektar. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang mempunyai lahan gambut terluas di Indonesia, dari 20 juta hektar lahan gambut di Indonesia, 4,6 juta hektar berada di Provinsi Riau.⁴

Lahan gambut di Riau mengalami kerusakan yang sangat signifikan, sejarah rusaknya lahan gambut di Provinsi Riau dalam catatan Walhi Riau, adalah sejak tahun 1997, yang pada saat itu industri perkebunan kelapa sawit dan hutan akasia menjadi aktor utama dari rusaknya hutan serta lahan gambut yang ada di Provinsi Riau. Setidaknya kita bisa membayangkan betapa lajunya perkembangan industri,

² Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.

³ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

⁴ Walhi Riau, 2016, *Dampak multidimensi bencana kebakaran hutan di beberapa wilayah kelola rakyat*. Hal 28.

secara khusus bila kita melihat dari sejarahnya, industri perkebunan kelapa sawit merupakan industri perkebunan dengan persentase yang paling cepat tumbuh kembangnya diantara industri akasia, ataupun industri perkebunan lainnya khususnya di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan pengelolaan serta perawatan perkebunan kelapa sawit tergolong mudah dan tidak memerlukan biaya yang cukup mahal, namun bisa mendapat keuntungan yang cukup besar.⁵

Sudah banyak contoh kasus mengenai perjuangan kaum perempuan dalam memperjuangkan lingkungan, seperti yang terjadi terhadap warga Kendeng, Jawa Tengah. Kisah ini bermula dari kekayaan alam batu gamping yang membentang di Pegunungan Kendeng Utara. Kekayaan alam ini kemudian menjadi sumber konflik ketika perusahaan semen ingin melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah tersebut. Rencana pembangunan pabrik semen dimulai tahun 2005 yang diawali oleh PT. Semen Gresik yang akan mendirikan pabrik di empat kecamatan diantaranya Sukolilo, Kayen, Gabus, dan Margorejo, yang terbagi dalam empat belas desa dengan total luas lahan 1.350 hektar. Namun, PT. Semen Gresik gagal melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan Kendeng karena penolakan warga.⁶

Kemunculan pabrik semen di pegunungan Kendeng tak lepas dari kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan investasi triliunan rupiah yang

⁵ Loc.cit

⁶Wulansari Ica, 2017. *Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme*, <http://www.mongabay.co.id/2017/03/06/kendeng-dan-gerakan-ekofeminisme/>, diakses pada 29 September 2017, pukul 8.50.

masuk ke Jawa Tengah. Investasi ini akan merangsang perekonomian karena dapat menyerap ribuan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.⁷

Dalam aksi protes yang terjadi di daerah Kendeng, juga memunculkan gerakan perempuan di daerah tersebut. Munculnya gerakan perempuan Kendeng, dikupas dari pemikiran ekofeminisme tak lepas dari kegelisahan perempuan terhadap praktik-praktik perusakan ekologis yang berujung pada ketidakadilan gender. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendekonstruksi keterpurukan ekologis yang dilakukan dan didominasi oleh kaum laki-laki.

Serupa tapi tak sama terjadi di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Dimana korporasi yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah menjadi musuh yang terus mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat pungkat. Hutan yang sejatinya adalah tempat mencari nafkah para penduduk, kini telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Hutan yang seharusnya dijaga demi keseimbangan ekosistem, kini telah rusak akibat keserakahan manusia itu sendiri.

Konflik ini dimulai sejak tahun 2012-2013 ketika PT. SAL perusahaan berbasis tanaman industri kelapa sawit membuat izin penggunaan hutan dan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Namun sejak awal kedatangan perusahaan ke Desa tersebut tidak ada masyarakat Desa yang setuju akan kedatangan perusahaan, ini disebabkan masyarakat tahu akan dampak buruk yang terjadi ketika PT. SAL masuk ke daerah mereka. Mulai

⁷ Loc.cit

dari hilangnya sumber mata air bersih mereka, sampai dengan berkurangnya penghasilan mereka akibat berkurangnya kayu akibat semakin minimnya luas dari hutan di desa mereka. Berkurangnya kayu berakibat para pengrajin kapal yang ada di desa tersebut kesulitan untuk mencari bahan baku untuk membuat kapal yang menjadikan berkurangnya penghasilan mereka akibat berkurangnya kayu akibat semakin minimnya luas dari hutan di desa mereka. Berkurangnya kayu berakibat para pengrajin kapal yang ada di desa tersebut kesulitan untuk mencari bahan baku untuk membuat kapal yang menjadi mata pencaharian dari masyarakat desa.

Berdasarkan data Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Indragiri Hilir, PT SAL belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Hal ini lah yang terus diperjuangkan Walhi dan lembaga anggota lainnya untuk berjuang bersama masyarakat pungkat guna memperjuangkan hak-hak mereka.⁸

Dari masalah yang terjadi antara masyarakat pungkat dan perusahaan, masyarakat Desa Pungkat membentuk komunitas yang bernama Komunitas Masyarakat Pungkat untuk memberikan perlawanan serta mempertahankan hak-hak mereka terhadap hutan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian mereka. Dampak dari perusahaan masuk ke desa pungkat sangat jelas mengganggu ekosistem yang ada dan banyak dampak buruk yang terjadi terhadap lingkungan yang ada. Hal ini dirasakan oleh masyarakat, mulai dari hilangnya sumber mata air mereka akibat

⁸ Winahyu Dwi Utami, 2014. *Masyarakat Desa Pungkat Inhil Tolak Keberadaan PT SAL*, <https://www.goriau.com/berita/umum/masyarakat-desa-pungkat-inhil-tolak-keberadaan-pt-sal.html>, diakses pada 9 November 2017, pukul 16.52.

rusaknya hutan, bahan baku untuk membuat kapal sulit untuk dicari, juga gangguan hama dari hutan yang rusak menjadi penyebab turunnya produksi perkebunan kelapa dan pinang milik warga. Sebelum perusahaan masuk ke desa pungkat, masyarakat masih bisa mendapatkan air bersih dengan mudah, namun ketika perusahaan masuk, masyarakat desa harus membeli air mineral kemasan dan menampung air hujan untuk dikonsumsi sehari-harinya.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 1.379.837 hektar atau 15,48% dari total luas Provinsi Riau, yang mana 72,37% daerahnya merupakan lahan gambut dan sekitar 20% diantaranya merupakan gambut yang dikategorikan dalam fungsi lindung karena mempunyai kedalaman lebih dari tiga meter. Investasi di Kabupaten ini didominasi perizinan sektor kehutanan, khususnya Hutan Tanaman Industri sebagai pemasok bahan baku kertas dan sektor perkebunan kelapa sawit.⁹

Sama seperti kabupaten lainnya di Provinsi Riau, Indragiri Hilir dalam catatan Walhi Riau mempunyai banyak catatan hitam terkait dengan penerbitan izin, seperti tiga korporasi yang diindikasikan terlibat dalam korupsi kehutanan, terkait penerbitan IUPHHK-HT,¹⁰ yang mana dua diantara korporasi tersebut berstatus sebagai terlapor di KPK. Bahkan pada 2016, terdapat dua korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla 2015 dihentikan penyidikannya oleh Polda Riau. Bahkan carut

⁹ Susanto, Rio. 2017. *Analisis Pelanggaran dan Pencabutan Izin PT SAL*, <http://www.walhi-riau.or.id/analisis-pelanggaran-dan-pencabutan-izin-pt-sal/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 16.25.

¹⁰ IUPHHK-HT singkatan dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

marut perizinan di Indragiri Hilir telah membuat DPRD Kabupaten ini melakukan pembahasan terkait *review* terhadap izin-izin perkebunan kelapa yang bermasalah, tercatat ada 7 perusahaan yang dipantau secara langsung dan 14 perusahaan yang masuk dalam catatan rekomendasi dalam rapat bersama Komisi I dan II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan Pemerintah Kabupaten. Menurut catatan WALHI Riau, korporasi-korporasi tersebut merupakan korporasi yang beraktivitas tanpa izin dan beraktivitas dengan izin yang diterbitkan secara sembarangan dalam rentang tahun 2002 hingga 2013, atau dipenghujung masa jabatan Bupati sebelumnya (Indra Muklis Adnan).¹¹ Salah satu, korporasi yang mendapat pantauan dan menjadi topik pembahasan terkait dengan kepatuhannya terhadap izin yang diterbitkan adalah PT. Setia Agrindo Lestari yang lokasi perkebunannya bertumpang tindih dengan masyarakat Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir.¹²

Dalam kasus yang penulis paparkan tersebut, Perempuan menjadi salah satu dari sekian banyak korban yang paling merasakan dampak yang terjadi dari masuknya perusahaan kelapa sawit yang ada di desa mereka. Mulai dari susah mencari sumber air bersih untuk dikonsumsi, sampai dengan berkurangnya hasil perekonomian suami mereka akibat turunnya produksi perkebunan pinang dan kelapa mereka, serta sulitnya para suami mereka mencari kayu untuk produksi kapal. Hal ini mengakibatkan para perempuan yang ada di desa Pungkat harus mencari alternatif

¹¹ Loc.cit

¹² Susanto, Rio. 2017. *Analisis Pelanggaran dan Pencabutan Izin PT SAL*, <http://www.walhi-riau.or.id/analisis-pelanggaran-dan-pencabutan-izin-pt-sal/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 16.25.

lain untuk menambah penghasilan keluarga mereka dengan membuat pernak-pernik, kerajinan rotan, hingga jilbab, guna membantu perekonomian keluarga mereka. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital bagi manusia, perempuan dalam hal ini sebagai manusia yang sering terlibat dalam menggunakan air, entah itu untuk memasak, mencuci dan hal lain sebagainya yang berkaitan dengan perempuan. Susahnya mencari sumber air bersih membuat perempuan Pungkat harus mencari alternatif lain untuk penggunaan sehari-hari, mulai dari meletakkan drum di depan rumah, sampai dengan membeli air galon mineral yang satuan harganya mencapai Rp. 15.000 per galon nya, yang tentu saja hal ini sangat merugikan perempuan dan masyarakat Pungkat.

Hal ini pun menyebabkan perempuan yang ada di Desa tersebut membentuk sebuah gerakan perempuan yang beranggotakan masyarakat Desa Pungkat. Terbentuknya gerakan perempuan ini merupakan satu langkah besar mereka dalam menolak korporasi berbasis perkebunan industri kelapa sawit yang masuk ke Desa mereka, juga dengan bertujuan melindungi Hutan dan Desa mereka dari kerusakan yang semakin parah. Karena dengan rusaknya hutan yang ada di Desa mereka akan berdampak langsung terhadap sektor ekonomi masyarakat Desa yang sangat mengandalkan hutan di kehidupan mereka.

Perempuan memiliki keterkaitan yang erat dengan lingkungan, perempuan dan masyarakat Pungkat sangat meyakini bahwa hutan merupakan sumber kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilestarikan, dari hutan manusia mendapatkan sumber

oksigen yang cukup, air bersih dan juga hasil alam yang melimpah didalamnya. Perempuan dalam hal ini yang paling tahu dan merasakan ketika hutan mereka rusak akibat ulah korporasi.

Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, perempuan lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan dan sumber daya alam. Dampak kerusakan lingkungan pun lebih sering dirasakan oleh perempuan. Contoh sederhana adalah ketersediaan air. Berkurangnya ketersediaan air lebih dirasakan kaum perempuan karena mereka merupakan pemakai air terbesar dalam rumah tangga.¹³

Gerakan perempuan menjadi langkah besar bagi perempuan yang ada di Desa Pungkat guna memberikan suara mereka terhadap lingkungan serta hutan dari Desa mereka yang semakin lama semakin rusak. Perempuan juga menjadi manusia yang sangat merasakan hancur dan rusaknya alam mereka akibat korporasi berbasis hutan tanaman industri yang ada di desa mereka. Berdasarkan pemaparan latar belakang, penulis memutuskan untuk mengambil judul penelitian “Gerakan Ekofeminisme, Studi Kasus Gerakan Perempuan Pungkat di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam menolak Perusahaan Kelapa Sawit”. Penulis juga ingin mengetahui secara mendalam tentang apa yang menyebabkan dibentuknya Gerakan Kelompok Perempuan yang ada di Desa Pungkat dalam konflik yang terjadi dengan Perusahaan kelapa sawit.

¹³ Davida W. Dana, 2013. *Perempuan dan Lingkungan*, http://wanita.sabda.org/perempuan_dan_lingkungan, diakses pada 31 Mei 2017, pukul 14.29.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana strategi gerakan perempuan punkat dalam menolak keberadaan perusahaan?
2. Bagaimana *output* dari gerakan perempuan punkat terhadap Pemerintah, perusahaan dan bagi masyarakat Desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui sejarah gerakan perempuan punkat dalam menolak perusahaan kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan gerakan perempuan punkat dalam menolak keberadaan perusahaan.
3. Untuk mengetahui dampak yang terjadi dari gerakan perempuan punkat terhadap pemerintah, perusahaan dan masyarakat desa.

1.3.2. Tujuan Subyektif

1. Untuk memenuhi persyaratan akademik guna mendapatkan gelar sarjana Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Untuk menambah wawasan penulis terhadap gerakan perempuan punkat yang menjadi tema penelitian.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan analisis serta pandangan lain tentang feminisme, tentang hak-hak dasar perempuan dan pergerakan perempuan yang kini mulai aktif dalam penyelamatan lingkungan hidup.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan serta menjadi pendorong untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, dimana perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang lebih dalam penyelamatan lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teoritis

Pada setiap penelitian, diperlukan konsep serta teori guna membantu penulis untuk melakukan setiap penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memasukkan dua teori utama guna membantu penulis dalam melakukan penelitian, yaitu teori Mobilisasi Sumberdaya dan Ekofeminisme, yang dirasakan penulis mampu membantu penulis guna menyelesaikan penelitian ini.

2.2. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Teori mobilisasi sumberdaya merupakan kerangka teoritik yang cukup dominan dalam menganalisis gerakan sosial dan tindakan kolektif.¹ Menurut Cohen, para teoritis mobilisasi sumberdaya mengawali tesis mereka dengan penolakan atas perhatian terhadap peran dari perasaan dan ketidakpuasan, serta penggunaan kategori psikologi dalam memahami gerakan sosial baru.²

Senada dengan Cohen, Zurcher dan Snow menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory (RMT)* merupakan reaksi atas pandangan tradisional dari teori-teori psikologi sosial tentang gerakan sosial. Para teoritis psikologi sosial umumnya

¹ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), hal 155.

² Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique*. (New Delhi: Sage publications India, Ltd), 106.

mengkaji partisipasi orang-orang dalam suatu gerakan sosial atas dasar-dasar sifat kepribadian, marginalisasi dan keterasingan, serta ketidakpuasan dan ideologi.³

Para teoritis yang berdiri dalam arus pemikiran ini, mempertanyakan asumsi konvensional bahwa secara umum para aktor mobilisasi kolektif adalah orang-orang yang mengalami alienisasi dan ketegangan sosial. Asumsi dasar paradigma mobilisasi sumberdaya adalah bahwa gerakan kontemporer mensyaratkan sebetulnya komunikasi dan organisasi yang canggih, ketimbang dari gerakan lama. Gerakan Sosial Baru adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional.⁴

Resource Mobilization Theory (RMT), pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Oberschall. Oberschall mengkritik *Mass Society Theory* yang dikembangkan Kornhauser, yang pada waktu itu merupakan perspektif yang sangat dominan dalam mengkaji gerakan sosial. Menurut Oberschall *Mass Society Theory* tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam gerakan anti demokrasi, seperti gerakan Nazi di Jerman.⁵

Resource Mobilization Theory (RMT), memfokuskan perhatiannya kepada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. *Resource Mobilization Theory*, lebih banyak memberikan perhatian terhadap faktor-faktor ekonomi dan politik. Teori ini juga dibangun tidak didasarkan atas asumsi bahwa terdapat motivasi individu ketika bergabung dalam suatu gerakan, dan adanya

³ Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participations: Social-Psychological Expansion of Resource Mobilization Theory*. *American Socio-logical Review*, Vol. 49, No. 5. 583.

⁴ Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*, (Terj.) Yogyakarta: Resist Book, hal 135.

⁵ Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall. 258.

keterasingan individu adalah dianggap tidak relevan. *Resource Mobilization Theory* berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat dimana muncul ketidakpuasan maka cukup memungkinkan untuk memunculkan sebuah gerakan sosial. Faktor organisasi dan kepemimpinan merupakan faktor yang dapat mendorong atau menghambat suatu gerakan sosial. Menurut Oberschall, istilah mobilisasi mengacu pada proses pembentukan kerumunan, kelompok, asosiasi, dan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif.⁶

Klandersmans, dngan mengutip pendapat dari Oberschall, Gamson, Marx dan Wood, McCarthy, Zald dan Snow, menyatakan bahwa *Resource Mobilization Theory* menekankan pada pentingnya faktor-faktor struktural, seperti ketersediaan sumberdaya untuk kolektivitas dan posisi individu dalam jalinan sosial, serta menekankan rasionalitas tentang partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang bukan sebagai konsekuensi dari sifat-sifat predisposisi psikologis, tetapi sebagai hasil proses-proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan untung dan rugi atas keterlibatannya dalam suatu gerakan sosial. Sejalan dengan pandangan Klandermans, selanjutnya Waterman menyatakan bahwa mobilisasi sumberdaya pada dasarnya suatu teori yang mengkaji rasionalitas dari perilaku gerakan sosial. Mmenurut Fireman dan Gamson, esensi dari

⁶ Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall. 259

Resource Mobilization Theory adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk partisipasi dalam suatu gerakan sosial.⁷

Selanjutnya ada dua model analisis dalam pendekatan *Resource Mobilization Theory*, yakni yang pertama, *The Political Interactive model (The Political process models)*. Model ini dikembangkan oleh Tilly, Gamson, Oberschall dan McAdam. Model ini lebih menekankan pentingnya perubahan struktur kesempatan bagi aksi kolektif, keberadaan jejaring, serta kaitan horizontal yang telah terbangun dengan kelompok-kelompok tertindas sebagai faktor penentu keberhasilan gerakan sosial. Jika negara kuat dan represif, maka gerakan sosial sulit untuk mencapai tujuannya, demikian juga sebaliknya.⁸ Pichardo menjelaskan bahwa model ini menekankan pada kapasitas internal dari komunitas untuk menghasilkan organisasi gerakan sosial.⁹ Sedangkan McAdam berpendapat bahwa ada tiga faktor yang dapat mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial, yaitu:¹⁰

1. Kekuatan Organisasi (*Organization Strength*)

Kekuatan organisasi, yakni level (tingkat kondisi) organisasi dalam masyarakat yang merasa dirugikan. Semakin terorganisir suatu kelompok orang-orang, maka akan semakin besar kemungkinan berhasilnya suatu gerakan. McAdam melalui *The Political process models*-nya mencatat

⁷ Pichardo, Nelson A. 1998. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theoretical Variations*. *The Sociological Quartely*, Vol.29, No1. 98.

⁸ Triwibowo, Darmawan. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. (Jakarta:LP3ES). Hal 11

⁹ Loc.cit

¹⁰ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), hal 180-182.

pentingnya kehadiran organisasi untuk membentuk gerakan baru. Keberadaan suatu organisasi apapun jenisnya akan membangun suatu struktur dari jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. McAdam berpendapat bahwa keberadaan suatu kelompok sosial akan memungkinkan munculnya motivasi sosial dan antar personal untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kelompok bersama anggota yang lainnya, sedangkan bagi anggota kelompok yang tidak mau bergabung dalam suatu gerakan, akan mendapat hukuman secara sosial.

2. *Cognitive Liberation*

Merupakan konsep sederhana, sebelum orang-orang ikut mengambil bagian dalam suatu gerakan, para anggota yang potensial di dalam gerakan tersebut harus mengembangkan ide bahwa suatu situasi dipandang tidak adil dan kondisi ini dapat diubah melalui tindakan kolektif. Sesuatu tersebut dipandang tidak adil ketika masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan tertentu, hal yang dirugikan bisa menyangkut keamanan, kesejahteraan, hingga kebutuhan hidup masyarakat. Mereka harus mengembangkan perasaan suatu deprivasi relatif,¹¹ yakin deprivasi ini salah memutuskan bahwa tujuan mereka adalah benar, dan yakin bahwa solusi atas problem mereka bersifat struktural.

3. Peluang Politik (*Political Opportunities*)

¹¹ Deprivasi Relatif adalah keadaan psikologis dimana seseorang merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan dan kekurangan yang subyektif pada saat diri dan kelompoknya dibandingkan dengan kelompok lain.

Peluang-peluang politik, adalah keselarasan antar kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar. Semakin besar suatu kelompok dapat bersatu di arena politik, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat melakukan perubahan dalam suatu sistem politik. *Political Opportunity* merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dua faktor yang lainnya. Organisasi-organisasi gerakan, harus memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan. Gerakan sosial bukan suatu ruang kosong, gerakan sosial merupakan produk dari lingkungan sosial dan politik di sekitarnya. Adanya perubahan dalam suatu sistem, akan memungkinkan untuk munculnya sebuah gerakan sosial.

Kedua, *The Organizational-entrepreneurial model*. Model ini dikembangkan oleh McCarthy dan Zald, model ini memandang bahwa dinamika organisasional, kepemimpinan dan pengelolaan sumberdaya merupakan faktor yang lebih signifikan dalam menentukan keberhasilan gerakan sosial. Model ini pada dasarnya mengaplikasikan teori pengembangan organisasi untuk menganalisis gerakan sosial serta memandang bahwa organisasi formal merupakan *carriers of Social movement*. Organisasi gerakan sosial adalah suatu organisasi yang kompleks, atau formal, yang mengidentikkan tujuannya dengan prefensi dari gerakan sosial dan berusaha mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan tersebut.¹²

Setiap gerakan sosial harus mampu mengelola sumber-sumber yang tersedia dengan baik. Sumber yang dimaksud disini ialah meliputi sumber material, seperti

¹² Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), hal 158.

pekerjaan, penghasilan, dan tabungan, serta sumber-sumber non material, seperti kewenangan, komitmen, kepercayaan, kemampuan dan lain sebagainya. Dari uraian teori mobilisasi sumberdaya, maka dapat dirumuskan faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial yaitu:

1. Organisasi Gerakan sosial.

McLaughlin, menyatakan bahwa karakteristik yang menonjol dari suatu gerakan sosial adalah meliputi adanya sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan, dan struktur organisasi. Selanjutnya Killian, berdasarkan hasil studinya tentang struktur peranan, posisi, dan norma diantara partisipan gerakan sosial, berkesimpulan bahwa karakteristik penting dalam suatu gerakan sosial adalah organisasi.¹³

2. Pemimpin dan Kepemimpinan.

Menurut Morris dan Stagegenborg, para pemimpin sangat penting dalam gerakan sosial, mereka menginspirasi komitmen, memobilisasi sumber-sumber, menciptakan dan memahami kesempatan-kesempatan, menyusun strategi, dan mempengaruhi hasil-hasil.¹⁴

3. Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya.

Menurut Edwards, dan McCarthy, dalam konteks gerakan sosial paling tidak ada lima tipe dari sumberdaya, yaitu sumberdaya moral, sumberdaya kultural,

¹³ Curtis, Russel L, Jr. & Zurcher, Louis A, Jr. 1974. *Social Movement: An Analytical Exploration of Organizational Forms*. Sosial Problems, Vol. 21, No.3. 356-370.

¹⁴ Snow, David A. Soule, Sarah A, & Kriesi, Hanspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 171.

sumberdaya organisasi sosial, sumberdaya manusia dan sumberdaya material.¹⁵

4. Jaringan dan Partisipasi.

Partisipasi individu dan kelompok merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kolektivitas dari orang-orang yang terlibat dalam upaya menciptakan atau menolak perubahan sosial. Organisasi gerakan sosial merupakan aktor kunci dalam gerakan sosial kontemporer. Keberhasilan suatu organisasi gerakan sosial dikaitkan dengan sejauhmana mobilisasi individu dan kelompok dalam mendukung gerakan.¹⁶

5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat.

Salah satu pendekatan yang menjelaskan tentang bagaimana kemunculan dan kekuatan tentang organisasi masyarakat lokal sebagai basis dari tindakan kolektif, adalah pendekatan sumberdaya dan organisasi, yakni pendekatan perbedaan distribusi tentang sumberdaya dalam memfasilitasi mobilisasi dan organisasi dari jaringan sosial.¹⁷

Hunter dan Staggenborg, selanjutnya menyatakan bahwa sumberdaya seringkali berasal dari sumber-sumber eksternal atas masyarakat lokal, baik bersifat *private*, non-profit, atau dana-dana publik untuk mendukung aktivitas-aktivitas dan program-program khusus. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber dana eksternal

¹⁵ Loc.cit

¹⁶ Tindall, D. B. 2004 *Social Movement Participations Over Time: An Ego Network Approach to Micro-Mobilization*. Sociological fokus. Vol. 37, No.2. 127.

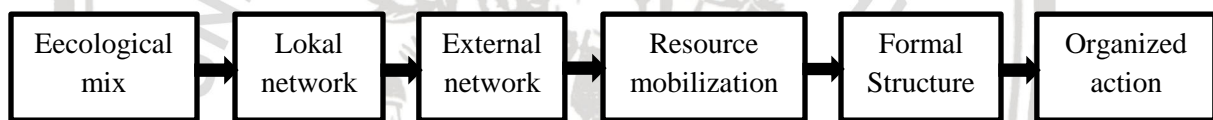
¹⁷ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), hal 176.

tergantung atas jaringan hubungan dengan masyarakat lokal, atau lebih khusus lagi masyarakat lokal yang mampu menempatkan organisasi-organisasi eksternal yang lainnya ke dalam masyarakat lokal.¹⁸

Untuk memperjelas bagaimana kaitan antara mobilisasi sumberdaya dan tindakan terorganisir dari masyarakat lokal, Hunter dan Staggenborg merumuskan bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1

Synthetic Model of Resource Mobilization by Local Communities for Organized Action



Sumber: Hunter & Staggenborg, dalam Milofsky, Hal 263.

Penjelasan umum dari model ini adalah bahwa karakteristik lingkungan pada masyarakat lokal akan menghasilkan pola dan tipe jaringan lokal dan jaringan eksternal. Melalui kemampuan mobilisasi sumberdaya, kemudian jaringan lokal dan eksternal menghasilkan struktur formal masyarakat lokal. Melalui struktur formal masyarakat lokal ini, kemudian terjadi tindakan yang terorganisir pada masyarakat lokal.

¹⁸ Milofsky, Carl. 1988. *Community Organizations: Studies in Resource Mobilizations and Exchange*. New York: Oxford University Press. 248

2.3. Ekofeminisme

Ekofeminisme adalah sebuah istilah baru untuk gagasan lama yang tumbuh dari berbagai gerakan sosial, gerakan feminis, perdamaian dan ekologi di akhir tahun 1970 dan awal 1980. Meskipun ini istilah yang pertama kali dipergunakan oleh francoise D'Eaubonne, namun baru menjadi populer dalam kaitannya dengan berbagai protes dan aktivitas menentang perusakan lingkungan hidup, yang semula dipicu oleh bencana ekologis yang terjadi secara berulang-ulang.¹⁹

Ekofeminisme merupakan suatu keterkaitan dan keseluruhan dari teori dan praktek. Hal ini menuntut kekuatan khusus dan integritas dari setiap unsur hidup. Kerusakan alam, kehancuran dunia beserta isinya yang kita rasakan saat ini, tak lepas dari akibat dominannya kaum pria yang terlibat langsung dalam aktor dari korporasi perusak lingkungan hidup dan ancaman kehancuran nuklir oleh militer. Dimanapun perempuan melakukan tindakan menentang kehancuran ekologi dan atau ancaman dari kehancuran nuklir, mereka segera menyadari akan keterkaitan antara kekerasan patriarki terhadap perempuan, manusia, dan alam, bahwa dengan menolak patriarki ini kita peduli akan generasi mendatang, kehidupan, serta planet ini.²⁰

Dalam perkembangan ekofeminisme, ada banyak hal yang menyebabkan berkembangnya gerakan ini, diantaranya adalah, pola kehidupan sosial masyarakat yang masih memposisikan perempuan sebagai pengelola urusan domestik. Ketika berurusan dengan dunia keluarga, tradisi umumnya yang berkembang di kalangan

¹⁹ Cahyono, Budi. 2016, *Ekofeminisme*, <http://gkjw.or.id/essay/ekofeminisme/> diakses pada 20 April 2017, pukul 23.09.

²⁰ Loc.cit

masyarakat adalah peran domestik menjadi kewajiban isteri (Perempuan), dan peran publik menjadi kewajiban suami (Pria), yang dimaksud dengan peran domestik adalah segala urusan kerumahtanggaan, seperti memasak, mencuci, menyeterika, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain sebagainya. Sedangkan peran publik adalah hal yang terkait dengan kemasyarakatan dan kegiatan atau pekerjaan di luar rumah.²¹

Anggapan bahwa urusan domestik di rumah adalah urusan perempuan masih kuat mengakar di sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal pemaknaan tradisional terhadap kaum perempuan yang seperti ini, membuat perempuan diperlakukan dengan salah. Perempuan hanya selalu ditempatkan pada posisi domestik saja, yakni hanya diposisikan di wilayah internal yang bertugas mengurus kehidupan keluarga, dan bukan yang menjadi penopang utama keluarga.²² Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa urusan rumah itu identik sebagai urusan perempuan.

Pembangunan yang dilakukan di era sekarang ini sering kali melupakan alam dan sekitarnya, eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berlebihan juga berdampak buruk terhadap alam di kemudian hari dan akan dirasakan dampaknya oleh manusia itu sendiri yang menjadi aktor tunggal dari rusaknya bumi khususnya kaum maskulin. Pembangunan bertujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua masyarakat Dunia Ketiga. Untuk beberapa wilayah, dan beberapa masyarakat, pembangunan yang dijanjikan tersebut memang terwujud akan

²¹ Cahyono, Budi. 2016, *Ekofeminisme*, <http://gkjw.or.id/essay/ekofeminisme/> diakses pada 20 April 2017, pukul 23.09.

²² Loc.cit

tetapi disebagian besar wilayah dan sebagian besar masyarakat yang lain menilai bahwa pembangunan justru menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan kemiskinan.²³

Beberapa hal yang menjadi letak kesalahan paradigma pembangunan adalah pembangunan semata-mata dititik beratkan pada model kemajuan ekonomi industri Barat, dengan asumsi bahwa kemajuan model Barat itu bisa di terapkan di semua negara. Pembangunan yang menyejahterakan seluruh negeri jadi disamakan dengan westernisasi terhadap kategori-kategori ekonomi kebutuhan hidup manusia, produktivitas dan pertumbuhan. Konsep-konsep dan kategori-kategori yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah hadir dalam konteks khusus dan industrialisasi dan pertumbuhan modal di pusat kekuasaan koloni, ditingkatkan pada level asumsi dan pandangan umum untuk bisa berhasil diterapkan di masyarakat bekas jajahan, dimana sebenarnya tingkat kebutuhan pokoknya berbeda sama sekali, yakni negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka. Kelak seperti yang dikemukakan Rosa Luxemburg²⁴, pada awal fase pembangunan industri di Eropa Barat, mensyaratkan kebutuhan terjadinya kolonialisasi secara permanen di negara-negara koloni oleh kekuasaan kolonial, serta penghancuran ekonomi alamiah negara setempat. Menurut Luxemburg, kolonialisasi bersifat tepat, sebuah prasyarat yang dibutuhkan bagi perkembangan kapitalisme, tanpa adanya wilayah koloni, akumulasi modal tidak akan mengalami perkembangan.

²³Shiva, Vandana. 2005. *Ecofeminism; Persepektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: IRE Press), hal 79.

²⁴ Luxemburg, Rosa, *The Accumulation of Capital*. (Rouledge dan Kegan Paul), London, 1951 ioo

Pembangunan sebagai akumulasi kapital dan komersialisasi ekonomi bagi generasi yang menikmati kelimpahan dan keuntungan, kemudian bukan hanya sekedar menghasilkan kemakmuran semata, melainkan juga menghasilkan baik kemiskinan maupun pemerasan. Penjiplakan model pembangunan ekonomi yang didasarkan pada komersialisasi pemanfaatan sumber daya alam bagi produksi komoditi di negara-negara yang baru merdeka, pada akhirnya menghasilkan koloni-koloni internal di negara tersebut dan melestarikan pertalian dengan kolonisasi lama. Pembangunan menjadi perluasan proyek menghasilkan kekayaan di dunia modern, visi ekonomi patriarki Barat.²⁵

Program tahunan PBB di bidang perempuan didasarkan pada anggapan bahwa kemajuan posisi ekonomi kaum perempuan akan mengalir secara otomatis seiring terjadinya perluasan dan penyebaran proses pembangunan. Di akhir dekade tersebut, menjadi jelas bahwa ternyata pembangunan itu sendirilah yang menjadi pangkal masalah. Semakin meningkatnya keterbelakangan perempuan bukan lantaran mereka tidak layak dan tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan, tapi karena perlakuan yang tidak adil, kerja yang mereka lakukan tidak dianggap sebagai kerja yang menghasilkan keuntungan. Pembangunan dan perampasan memperparah degradasi degradasi proses-proses kolonisasi ekologi dan hilangnya kontrol politik terhadap basis sumber kehidupan. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kolonisasi baru, semakin menjauhkan sumber daya alam dari mereka yang

²⁵ Shiva, Vandana, 2005, *Ecofeminism; Persepektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: IRE Press), hal 80.

sesungguhnya paling membutuhkan. Tetapi saat ini, bukanlah kekuatan kolonial lama melainkan kekuatan elit-elit nasional baru yang menjadi otak dari eksploitasi alam demi kepentingan nasional dan hal ini semakin dibenarkan dengan adanya kekuatan teknologi yang semakin dikuasai dan semakin merusak.²⁶

Sudah banyak contoh kasus pergerakan perempuan untuk menuntut keadilan ekologis yang terjadi di dunia. Agresi para aktor korporasi terhadap lingkungan hidup hampir dirasakan secara fisik sebagai sebuah agresi terhadap perempuan. Hal ditegaskan oleh banyak perempuan yang turut serta dalam gerakan ini. Seperti perempuan di Swiss yang berdemonstrasi menentang peracunan di Saveso mengatakan bahwa mereka seharusnya berfikir tentang pengawasan tubuh perempuan dalam sesuatu yang lebih global, karena tidak saja laki-laki dan para dokter yang bersikap agresif terhadap tubuh perempuan, tetapi juga perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka juga berpendapat agresi seperti apalagi yang melebihi agresi terhadap tubuh perempuan, terhadap anak-anak dibandingkan agresi yang dilakukan La Roche Givaudan di Saveso sejak 10 Juli 1976.²⁷

Perempuan di India juga menjadi salah satu dari sekian banyak kasus penindasan kaum perempuan di dunia. Pada malam hari, tanggal 2-3 Desember 1984, 40 ton gas beracun dilepaskan dari pabrik pestisida Union Carbide di Bhopal, India. 3000 Orang meninggal selama bencana tersebut dan 400.000 yang lain terkena

²⁶ Shiva, Vandana, 2005, *Ecofeminism; Persepektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: IRE Press), hal 83.

²⁷ Shiva, Vandana, 2005, *Ecofeminism; Persepektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: IRE Press), hal 15-16.

dampaknya, kemungkinan besar meninggal setelah itu, dan mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Kaum perempuan telah menjadi korban yang terkena dampak paling parah, sekaligus juga menjadi yang paling gigih memperjuangkan keadilan. Bhopal Gas Peedit Mahila Udyog Sangathan, masih terus mengingatkan pemerintah India, Union Crdibe dan dunia bahwa mereka masih menderita, dan berapapun uang yang dikompensasikan tidak akan dapat memulihkan kehidupan serta kesehatan para korban. Sebagaimana dikatan oleh Hamidabi, salah seorang perempuan Muslim dari kaum miskin dari daerah Bastis yang terkena bencana paling parah. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti berjuang sampai keadilan berpihak kepada mereka, semua bermula dari 3000 orang yang dimakamkan masal akibat bencana tersebut²⁸.

Masih tentang perjuangan perempuan di India. Sejak berabad-abad, penduduk desa di India, terutama di wilayah perbukitan dan pegunungan, menggantungkan hidup pada hutan. Hutan menyediakan makanan, bahan bakar, pakan ternak, serta menjaga kelangsungan sumberdaya tanah dan air. Keselarasan dengan alam sangatlah penting, hutan adalah segala-galanya.

Pada 1821, secara bertahap kendali atas wilayah hutan beralih ke tangan pemerintah. Perlawanan pun muncul, pada 1916 para pejabat Inggris bingung atas pembakaran rumah yang disengaja dan terorganisasi oleh orang-orang dari Kumaon karena pembukaan hutan untuk kepentingan komersial tapi juga kehilangan hak-hak

²⁸Shiva, Vandana, 2005, *Ecofeminism; Persepektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, (Yogyakarta: IRE Press), hal 16.

tradisional mereka. Terjadi pemogokan terhadap *Utar* (kerja paksa). Hutan-hutan pinus dibakar di seluruh Kumaon, terutama di Almora.²⁹

Protes atas kebijakan hutan, yang bertentangan dengan kepentingan lokal, berlanjut setelah kemerdekaan. Puncaknya terjadi pada 1970-an dengan Gerakan Chipko. Adanya isu tentang pembukaan lahan tersebut membuat masyarakat geram atas tindakan tersebut. Pelopor dari gerakan masyarakat tersebut adalah Chandi Prasad Bhatt, pekerja sosial yang menganut ajaran Mahatma Gandhi. Dia membentuk *Dasholi Gram Swarajya Mandal* (DGSM) di Gopeshwar pada 1964 untuk membangun kewirausahaan dan kemandirian dengan membangun usaha kecil yang memanfaatkan sumber daya hutan. Pada akhirnya mereka berhadapan dengan para kontraktor yang hendak mengeksploitasi hutan. Mereka mulai bertekad untuk memperjuangkan hak-hak hutan. Mereka melancarkan gelombang protes. Banjir bandang di Alaknanda pada 1970 mendorong mereka terus memperkeras aksi. Pada 1972 mereka melakukan demonstrasi di Purola, Uttarkashi, dan Gopeshwar. Upaya itu gagal. Mereka terpaksa mencari cara baru³⁰.

Gerakan Chipko dimulai pada April 1973 di distrik Chamoli. Gerakan Chipko sendiri ialah aksi dengan cara memeluk pohon sebagai tanda masyarakat menolak perusahaan mengeksploitasi hutan mereka. Gaura Devi, seorang perempuan dari desa Lata, memimpin 27 perempuan di desa Reni menuju lokasi dan menghadapi para penebang. Mereka mendapat intimidasi dan perlakuan kasar, bahkan ancaman

²⁹ Mukti M, *Gerakan Memeluk Pohon*, <http://historia.id/mondial/gerakan-memeluk-pohon> , diakses pada 10 Desember 2017, pukul 12.23.

³⁰ Loc.cit.

kekerasan. Devi bahkan menantang seorang pria pekerja perusahaan bersenjata api untuk menembak dirinya ketimbang menebangi pohon. Baginya, hutan sama dengan *Maika* (rumah ibunya).³¹

Dengan aksi tersebut yang terjadi selama empat hari berturut-turut, pihak perusahaan pun gagal untuk menebang pohon guna membuka lahan baru. Para perempuan berhasil mengusir para pekerja kontraktor pada 26 Maret 1974. Ini adalah titik penting bagi Gerakan Chipko, yang menandai kali pertama perempuan mengambil inisiatif. Insiden di Desa Reni mendorong pemerintah negara bagian membentuk sebuah komite beranggotakan sembilan orang, dipimpin ahli botani Virendra Kumar. Pemerintah juga meminta perusahaan kayu menarik orang-orangnya dari Desa Reni hingga komite mengambil keputusan. Setelah dua tahun bekerja, komite menghasilkan laporan: hutan Reni merupakan areal sensitif dan tak satu pohon pun boleh ditebang. Pemerintah mengeluarkan larangan komersialisasi hutan selama 10 tahun di Reni dan hampir 1.200 km persegi di daerah hulu Alaknanda, larangan itu diperpanjang selama 10 tahun pada 1985.³²

Gerakan Chipko berhasil menyelamatkan hutan. Seiring waktu, Chipko sendiri kian berkembang dan terorganisir, bahkan melintasi batas-batas geografis. Gerakan Chipko bisa dipertimbangkan sebagai satu kisah keberhasilan penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam proses pembangunan masyarakat lokal melalui perlindungan hutan dan lingkungan.

³¹ Loc.cit

³² Loc.cit

2.3.1 Akar Gerakan Ekofeminisme

Sebenarnya dalam pembentukan gerakan sosial, ekofeminisme adalah istilah baru untuk gagasan lama. Istilah ekofeminisme mulai populer di akhir tahun 1970-1980-an sebagai protes dan aktivitas menentang perusakan lingkungan hidup yang berlanjut menjadi bencana ekologis secara berulang-ulang.

Ekofeminisme juga menyalakan kembali api spiritualis yang kerap diabaikan baik oleh Materialisme Marxist juga Kapitalisme Patriarkis. Spiritualitas ekofeminisme mempunyai signifikansi ekologis dalam rangka penemuan kembali kesucian kehidupan berbasis ibu pertiwi yang selama ini dimaskulinisasi demi kepentingan industrial. Kaum perempuan yang menganut aliran ekofeminisme sepakat bahwa perempuan harus mengambil porsi lebih besar dalam gerakan perdamaian.³³

Francoise d'Eaubonne yang pertama kali memperkenalkan "Revolusi Ekologis" juga berpendapat hanya perempuanlah yang cocok mengemban misi perdamaian.³⁴ Perempuan memiliki potensi melakukan revolusi ekologis, sebab kedekatannya dengan konsep ibu bumi. Sementara laki-laki justru harus disadarkan dari sikap destruktifnya. Ia mengingatkan kerusakan peradaban pasti akan terus terjadi bila kekuasaan masih diambil alih oleh laki-laki. Karen J. Warren menspesifikasi lebih jauh asumsi dasar dari ekofeminisme. Ia mengatakan, ada

³³Tyas Retno Wulan, *Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*. Solidaty: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 1 No. 1, 2007, 118.

³⁴ Loc.cit.

keterkaitan penting antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam. Pemahaman terhadap alam dalam keterkaitan ini adalah penting untuk mendapatkan pemahaman yang memadai atas opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam. Teori dan praktik feminis harus memasukkan perspektif ekologi dan pemecahan masalah ekologi harus menyertakan perspektif feminis.³⁵

2.3.2. Tipologi Ekofeminisme

Meskipun ekofeminisme setuju bahwa hubungan antara perempuan dengan alam adalah penyebab utama seksisme, mereka tidak sepakat dalam hal apakah hubungan perempuan dengan alam pada dasarnya bersifat biologis dan psikologis, ataukah pada dasarnya bersifat sosial dan kultural. Mereka juga tidak sepakat mengenai hal apakah perempuan harus menghilangkan, menekankan, atau membentuk kembali hubungannya dengan alam. Pada titik inilah muncul beragam aliran Ekofeminisme.³⁶ Tabel berikut akan menjelaskan tipologi dari beberapa aliran ekofeminisme:

³⁵ Loc.cit.

³⁶ Tyas Retno Wulan, *Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*. Solidaty: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 1 No. 1, 2007, 120.

Tabel 2.1

Perbandingan Tipologi Aliran Ekofeminisme

	Ekofeminisme Alam/Kultural	Ekofeminis Spiritual	Ekofeminis Sosial/Konstruksi Sosial	Ekofeminis Transformatif
Asumsi tentang hubungan perempuan dan alam	Berusaha memperkuat, bahwa sifat yang dihubungkan dengan perempuan bukan semata-mata hasil konstruksi kultural namun juga produk dari pengalaman aktual biologis dan psikologis.	Berusaha memperkuat, bahwa ada hubungan yang dekat antara degradasi lingkungan dan keyakinan bahwa tuhan memberikan manusia kekuasaan atas bumi. Hubungan perempuan dengan alam lebih diuntungkan dari pada hubungan laki-laki terhadap alam.	Menghilangkan penekanan hubungan perempuan dengan alam.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengakui dan mengeksplisitkan keterkaitan antara semua sistem opresi. 2. Menekankan keberagaman pengalaman perempuan. 3. Menolak logika dominasi. 4. Memikirkan ulang apa artinya menjadi manusia dan dengan penuh keberanian mempertimbangkan kembali apakah manusia harus memandang kesadaran dan rasionalitas. 5. Bergantung pada etika yang menekankan nilai-nilai feminisme tradisional yang cenderung untuk menjalin hubungan antar manusia. 6. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dipergunakan untuk menjaga

	Ekofeminisme Alam/Kultural	Ekofeminis Spiritual	Ekofeminis Sosial/Konstruksi Sosial	Ekofeminis Transformatif
				kelangsungan bumi.
Akar feminisme	Radikal Kultural	Radikal Kultural	Sosialis	Transformatif
Tokoh	Mary Daly: Gyn/Ecology, Susan Griffin	Starhawk	Dorothy Dinnerstein, Karren J. Warren	Maria Mies dan Vandana Shiva

Sumber: Data diolah penulis dari Jurnal Tyas Retno Wulan, Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan, 2017.

Dalam tabel yang menjelaskan tipologi ekofeminisme tersebut, terlihat bahwa asumsi tentang hubungan perempuan dengan alam di dalam pandangan Ekofeminisme kultural berusaha memperkuat, bahwa sifat yang dihubungkan dengan perempuan bukan semata-mata hasil konstruksi kultural, namun juga produk dari pengalaman aktual biologis dan psikologis. Sedangkan menurut penganut pemahaman Ekofeminis spiritual, mereka berpendapat bahwa ada hubungan yang dekat antara degradasi lingkungan dan keyakinan bahwa tuhan memberikan manusia kekuasaan atas bumi. Hubungan perempuan dengan alam lebih diuntungkan dari pada hubungan laki-laki terhadap alam, karna dalam pandangan mereka, laki-laki berperan besar dalam terjadinya kerusakan yang ada di bumi. Menurut pandangan Ekofeminis Sosial, mereka berusaha menghilangkan keterkaitan antara perempuan dan alam, mereka mencoba menghilangkan penekanan hubungan perempuan dengan alam.

Sedangkan menurut pandangan Maria Mies dan Vandana Shiva penganut Ekofeminisme Transformatif mereka mempunyai enam karakteristik yaitu:³⁷

1. Mengakui dan mengeksplisitkan keterkaitan antara semua sistem opresi.
2. Menekankan keberagaman pengalaman perempuan.
3. Menolak logika dominasi.
4. Memikirkan ulang apa artinya menjadi manusia dan dengan penuh keberanian mempertimbang-kan kembali apakah manusia harus memandang kesadaran dan rasionalitas.
5. Bergantung pada etika yang menekankan nilai-nilai feminisme tradisional yang cenderung untuk menjalin hubungan antar manusia.
6. Ilmu pengetahuan dan teknologi hanya dipergunakan untuk menjaga kelangsungan bumi.

Berdasarkan analisis Warren atas feminisme transformatif, tampaknya memberi ruang berpikir bagi perempuan dan laki-laki dari seluruh dunia untuk dapat berkumpul untuk bergabung dan bertukar pendapat feminis yang beragam. Sebagai ekofeminis sosialis transformatif, Mies dan Shiva yakin bahwa ada cukup kesamaan antara perempuan untuk memotivasi perempuan agar bekerja sama melawan patriarki kapitalis.

³⁷ Tyas Retno Wulan, *Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*. Solidaty: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 1 No. 1, 2007, 126.

2.4 Penelitian Terdahulu

Gerakan perempuan sangat minim kita temui di Indonesia, dibandingkan gerakan sosial lainnya, jarang kita menjumpai para kaum feminis berjuang menuntut hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Namun dalam perkembangannya peran serta perempuan dan gerakan-gerakan yang mereka buat terkadang mempunyai andil yang besar dalam mempengaruhi kebijakan. Khusus pada pengelolaan lingkungan di era sekarang harusnya ada peran lebih dari kelompok perempuan untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini perlu dilakukan agar perempuan memahami betapa pentingnya lingkungan hidup untuk masa yang akan datang. Dengan pemahaman tersebut, perempuan akan mempunyai andil besar untuk menjaga, memelihara lingkungan dengan baik dan juga dapat menjaga kebersihan lingkungan dari lingkup yang paling kecil.

Secara spesifik, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang pengaruh dan andil dari perempuan dalam sebuah gerakan sosial. Terdapat 2 penelitian terdahulu yang penulis dapatkan guna menjadi acuan bagi penulis dan sekaligus pembeda dari penelitian yang sudah ada, berikut adalah penjabarannya.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Penelitian I	Penelitian II
Judul Penelitian	Gerakan Sosial Perempuan Tani dalam Penyelamatan Lingkungan Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati.	Gerakan Ekofeminisme Perempuan Muslimah Pesisir dalam Adaptasi Perubahan Iklim di Surabaya Jawa Timur.
Nama Peneliti	Wakhidatin Nurul Hidayah	Ahmad Sihabul Millah
Tahun Penelitian	2014	2015
Metode	Deskriptif	Deskriptif
Fokus Penelitian	Terkait tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Simbar Wareh untuk menjaga keberlanjutan kelompok pasca PT. Semen Gresik membatalkan rencana pembangunan pabrik di wilayah tersebut.	Penelitian ini terfokus tentang bagaimana asal-usul gerakan ekofeminisme perempuan muslimah dalam konservasi di kawasan pantai dan bentuk gerakan ekofeminisme dalam adaptasi perubahan iklim di pantai Wonorejo Rungkut Surabaya.

<p>Hasil Penelitian</p>	<p>Implikasi dari terbentuknya serta adanya gerakan sosial penyelamatan lingkungan Pegunungan Kendeng terhadap perempuan petani (anggota kelompok Simbar Wareh) adalah adanya perubahan sosial yang ditandai dengan adanya gerak sosial (social mobility). Masyarakat khususnya kaum perempuan lebih tersadarkan dan berpikiran terbuka akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi generasi anak cucu mereka nantinya.</p>	<p>Dari penelitian ini didapatkan bahwa asal usul gerakan ekofeminisme perempuan muslimah pesisir Wonorejo Surabaya dalam konteks perubahan iklim akibat pemanasan global dilatarbelakangi dengan adanya abrasi pantai yang menyebabkan beberapa tambak hilang tertelan ombak dan naiknya permukaan air laut. bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan perempuan (Ekofeminisme) dalam Konteks Adaptasi Perubahan di Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya adalah sebagai berikut: konservasi hutan mangrove, pembuatan ekowisata mangrove, dan penguatan soft skill (Capacity Buliding) melalui pelatihan-pelatihan tanaman mangrove untuk dijadikan batik, sirup dan dodol, lerak, dan lain sebagainya. Dari pola adaptasi tersebut, perempuan bisa mandiri secara ekonomi.</p>
--------------------------------	---	---

Sumber: Data diolah penulis dari penelitian Wakhidatin Nurul Hidayah, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan Ahmad Sihabul Millah, Universitas STIQ An-Nur Yogyakarta, 2017.

Penelitian yang penulis ambil secara garis besar merupakan contoh yang menggambarkan tentang pergerakan perempuan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pati dan Kota Surabaya. Secara garis besar kedua penelitian tersebut sama-sama berkaitan satu sama lain, yang membedakannya yaitu penelitian dari Wakhidatin Nurul Hidayah terfokus tentang Gerakan Sosial

Perempuan Tani dalam Penyelamatan Lingkungan Pegunungan Kendeng Kabupaten Pati, yang mana fokus dari penelitiannya tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Simbar Wareh untuk menjaga keberlanjutan kelompok pasca PT. Semen Gresik membatalkan rencana pembangunan pabrik di wilayah tersebut.

Sedangkan penelitian dari Ahmad Sihabul Millah, terfokus kepada bagaimana asal-usul gerakan ekofeminisme perempuan muslimah dalam konservasi di kawasan pantai dan bentuk gerakan ekofeminisme dalam adaptasi perubahan iklim di pantai Wonorejo Rungkut Surabaya. Sedangkan dari segi metode keduanya sama-sama memakai metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Masuk ke kesimpulan keduanya, penelitian dari Wakhidatin Nurul Hidayah menyimpulkan bahwa implikasi dari adanya gerakan sosial penyelamatan lingkungan Pegunungan Kendeng terhadap perempuan petani (anggota kelompok Simbar Wareh) adalah adanya perubahan sosial yang ditandai dengan adanya gerak sosial (social mobility). Masyarakat khususnya kaum perempuan lebih tersadarkan dan berpikiran terbuka

akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi generasi anak cucu mereka nantinya.

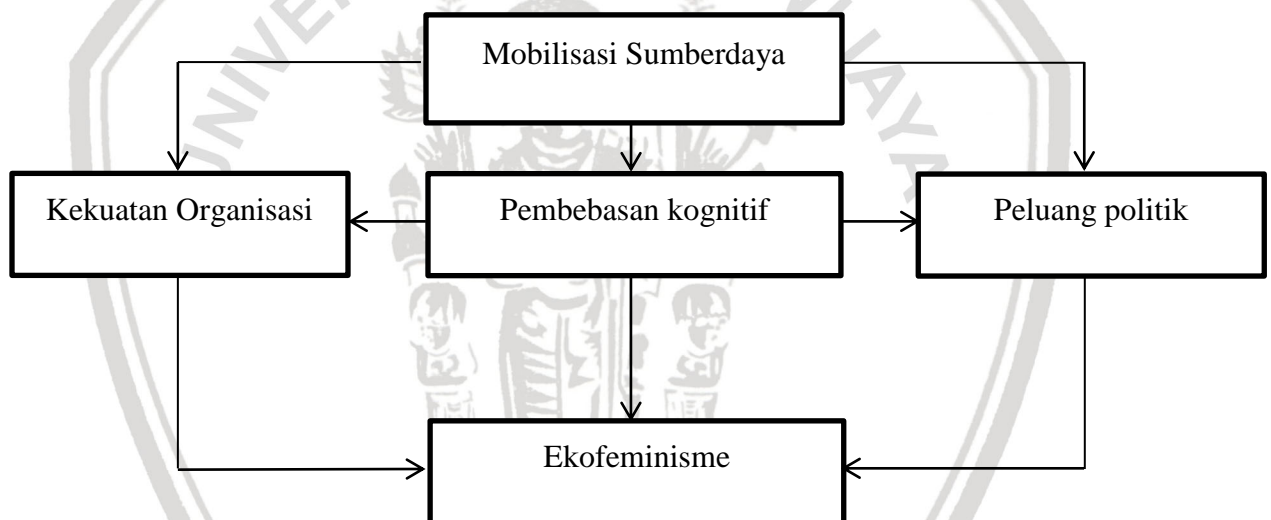
Sedangkan dari penelitian Ahmad Sihabul Millah menyimpulkan bahwa asal usul gerakan ekofeminisme perempuan muslimah pesisir Wonorejo Surabaya dalam konteks perubahan iklim akibat pemanasan global dilatarbelakangi dengan adanya abrasi pantai yang menyebabkan beberapa tambak hilang tertelan ombak dan naiknya permukaan air laut, bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan perempuan (Ekofeminisme) dalam Konteks Adaptasi Perubahan di Wonorejo Kecamatan Rungkut Surabaya adalah sebagai berikut: konservasi hutan mangrove, pembuatan ekowisata mangrove, dan penguatan soft skill (Capacity Buliding) melalui pelatihan-pelatihan tanaman mangrove untuk dijadikan batik, sirup dan dodol, lerak, dan lain sebagainya. Dari pola adaptasi tersebut, perempuan bisa mandiri secara ekonomi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir yang penulis gunakan merupakan satu kesatuan alur yang mampu menjelaskan hubungan teori dengan penelitian ini. Dalam menjawab strategi Gerakan perempuan, penulis menggunakan teori mobilisasi sumberdaya sebagai pisau analisis, karena dalam teori tersebut dijelaskan tiga faktor yang mendorong berhasilnya satu gerakan yaitu kekuatan organisasi, pembebasan kognitif dan membuka peluang politik. Dari ketiga faktor tersebut nantinya akan dijelaskan juga hubungan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan. Sedangkan ekofeminisme disini muncul untuk menjelaskan keterkaitan antara perempuan dan alam sebagai satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh perempuan Pungkat dan menganggap bahwa hutan adalah sumber kehidupan yang diberikan tuhan untuk manusia, dan sepatutnya mereka para perempuan Pungkat menjadi orang pertama yang membela hutan mereka dari kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Untuk lebih jelasnya penulis jelaskan pada bagan berikut ini.

Bagan 2.2 Kerangka Pemikiran³⁸



³⁸ Catatan penulis, 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Tipe dan Pendekatan Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sistematis dan sesuai dengan fakta di lapangan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan tentang pengaruh dari gerakan perempuan yang ada di Desa Pungkat terkait penolakan masyarakat desa terhadap perusahaan kelapa sawit yang hadir di lingkungan mereka.

Menurut Sugiyono Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹

Pada dasarnya metode kualitatif akan menampilkan data yang lebih beragam, produktif dan tidak standar. Sumber data yang dipakai dalam penelitian kualitatif berupa lingkungan alamiah. Sedangkan kajian utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial.

Penelitian dilaksanakan ketika berinteraksi langsung dalam tempat kejadian. Peneliti melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang

¹ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 17.

berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungan ke berbagai sumber, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya. Hasil analisis data tersebut berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang sedang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut biasanya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Dalam penelitian kualitatif, kita juga merenungkan konsep sebelum melakukan pengumpulan data. Konsep inilah yang kemudian akan terus dikembangkan dan disempurnakan selama atau setelah proses pengumpulan data. Peneliti menguji kembali dan merenungkan data serta konsep secara simultan dan interaktif.²

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah merupakan inti serta sumber dari masalah penelitian. Untuk menemukan jawaban yang tepat, diperlukan pengumpulan data pada latar penelitian atau di lapangan guna mendapatkan data yang *real*. Adapun fokus dari penelitian ini adalah Gerakan Perempuan Pungkat dalam menolak perusahaan kelapa sawit.

² Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta:Indeks). hlm. 225 & 226

Masalah ini terfokus kepada gerakan perempuan terkait penolakan mereka terhadap PT. SAL yang ada di desa mereka. Kehadiran PT. SAL mengakibatkan rusaknya hutan desa dan hilangnya sumber mata air bersih yang selama ini mereka konsumsi, serta timbulnya hama dari hutan yang rusak tersebut, sehingga mempengaruhi hasil perkebunan masyarakat.

3.3. Lokasi dan Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan data dan sumber yang maksimal, lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian berada di Kabupaten Indra Giri Hilir, kecamatan Gaung, Provinsi Riau, yang menjadi tempat terjadinya permasalahan antara PT. SAL dan masyarakat Desa Pungkat.

Sedangkan subjek penelitian ini adalah kelompok Gerakan perempuan yang ada di desa Pungkat, dimana orang-orang tersebut terlibat langsung dalam permasalahan yang ada, subjek lain yang akan coba dihadirkan melalui penelitian ini adalah Walhi Riau sebagai pembimbing sekaligus Pembina gerakan kelompok perempuan yang ada di desa Pungkat.

3.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan yang penulis pakai dalam penelitian ini didapat dengan cara menggunakan teknik *Purposive*, dimana dalam hal ini peneliti tidak menggunakan informan secara acak, melainkan sudah menentukannya terlebih dahulu. Dalam penelitian ini juga tidak ada kriteria baku untuk menetapkan berapa banyak jumlah informan. Berikut kriteria informan yang telah penulis tetapkan:

1. Informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam gerakan perempuan di Desa Pungkat.
2. Informan dapat menjelaskan serta memberikan data dan fakta yang sebenarnya dilapangan.
3. Informan mempunyai cukup waktu untuk dapat di wawancarai.

Dalam penelitian ini terdapat tiga informan yakni informan kunci, informan pendukung dan informan tambahan. Diantaranya adalah:

1. Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini penulis mengusulkan untuk bisa menjadikan Ibu Masniar, selaku ketua dari gerakan perempuan masyarakat Pungkat, serta Ibu Ernawati selaku wakil ketua sebagai narasumber kunci.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah staf dari Walhi Riau, Fandi Rahman dan Devi Indriani yang terlibat langsung dalam memberikan masukan dan saran terkait pergerakan perempuan di Desa Pungkat

3. Informan Tambahan

Dalam penelitian ini informan tambahan merupakan Pemerintah Desa serta Perwakilan dari pihak perusahaan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Dalam penelitian ini, penulis memiliki 2 (dua) teknik pengumpulan data yang akan digunakan, yaitu teknik pengumpulan data secara primer dan juga sekunder. Data-data primer dan sekunder tersebut akan penulis dapatkan dari fokus penelitian selama di lapangan. Adapun sumber bukti tersebut meliputi ³:

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam praktek dilapangan penulis mewawancari dua orang tokoh dari perempuan punggkat yaitu Masniar dan Hernawati sebagai informan utama. Sedangkan informan tambahan penulis dapatkan dari Fandi Rahman dan Devi Indriani sebagai staf Walhi Riau yang juga terlibat langsung dalam membimbing perempuan punggkat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dokumen dari Walhi Riau, mulai dari data

³ Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 180-181.

pelanggaran yang dilakukan oleh PT. SAL, sampai dengan hasil rapat gabungan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

3. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan lapangan, sehingga penulis harus tinggal di desa Pungkat selama dua hari untuk melakukan penelitian. Akses Desa yang hanya bisa dilalui oleh perahu motor dari Kota Tembilahan, memaksa penulis untuk tinggal sementara di Desa tersebut untuk mengamati serta melakukan pencarian fakta yang sesungguhnya terkait konflik antara masyarakat dan PT. SAL.

3.6 Analisis Data

Setiap data yang penulis dapat dari narsumber akan dianalisis secara mendalam. Analisa data dilakukan dengan cara berikut⁴:

1. Reduksi Data

Dalam tahap reduksi data, penulis melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh, sehingga pada kelanjutannya, data yang diperoleh bisa tersusun dengan rapi dan lengkap.

2. Penyajian Data

⁴Miles, Matthew B., Huberman. A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press. hlm. 16-17.

Data yang sudah di dapatkan oleh penulis, akan menjadi sekumpulan informasi yang nantinya akan disusun dan diuraikan hingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat serta menyeluruh.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan merupakan sebuah proses panjang dari keseluruhan penelitian yang melibatkan semua elemen dalam penelitian seperti responden, narasumber juga data yang melengkapi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang diambil merupakan kumpulan dari data-data yang penulis temukan selama penelitian berlangsung.

3.7 Keabsahan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menemukan kesahihan data adalah dengan menggunakan Triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari

subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.⁵ Hal yang dilakukan dalam teknik Triangulasi yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan menggunakan prosedur ini, penulis ingin mendapatkan bukti-bukti yang kuat dengan melihat indeks-indeks internal lain yang dapat memberikan bukti yang kuat. Penulis akan mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

⁵ Mudjia, Rahardjo. 2010. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 12 oktober 2017, pukul 20.30.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Profil Desa Pungkat

Nama desa Pungkat berasal dari dua kata pung dan kat, pung singkatan dari kata kampung sedangkan kat singkatan dari kata rengkat atau rantang jadi kata Pungkat merupakan kampung rengkat atau rantang. Kampung ini dimana pada awal mula pembuka kampung ditemukan sebuah rantang besar yang konon adalah rantang yang digunakan Raja untuk perbekalan yang tertinggal ditempat tersebut dengan demikian maka kampung tersebut dinamakan Pungkat.¹

Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, merupakan letak administratif dimana Desa Pungkat berada, wilayah ini terdiri dari 11 Desa, antara lain Desa Belantaraya, Jerambang, Kuala Lahang, Lahang Baru, Lahang Hulu, Lahang Tengah, Pungkat, Simpang Gaung, Sungai Baru, Teluk Kabung, dan Terusan Kempas.² Dari segi kependudukan, penduduk Desa Pungkat pada tahun 2016 dari sumber data yang penulis dapatkan berjumlah 2231 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1071 jiwa dan penduduk perempuan 1160 jiwa.³

¹ *Rengkat* menurut masyarakat melayu setempat yang berarti tempat atau wadah untuk membawa perbekalan makanan.

² Wikipedia Indonesia, Kecamatan Gaung, Inhil https://id.wikipedia.org/wiki/Gaung,_Indragiri_Hilir, Diakses pada 23 November 2017, pukul 12.27.

³ Data diperoleh dari Sistem Informasi Geografis Sarana dan Prasarana Kabupaten Indragiri Hilir. 2018, <http://webgis.bappeda.inhilkab.go.id/kecamatan-desa> diakses pada 26 Maret 2018, pukul 22.42.

4.1.1. Keadaan dan Mata Pencaharian Masyarakat Pungkat

Sebagian besar penduduk desa Pungkat mengelola kebun kelapa dan pinang dan sudah menjadi pekerjaan turun menurun dan tradisi di desa tersebut, sebagiannya lagi merupakan pengrajin kapal tradisional, yang mana kapal yang dibuat oleh masyarakat pungkat memiliki kualitas yang bagus dan bahkan sudah di ekspor keluar pulau Sumatera, seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi hingga Papua.⁴

Luas keseluruhan Desa pungkat mencapai 7076,89 hektar, sedangkan luas areal konsesi⁵ yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit oleh PT. SAL di wilayah Desa Pungkat berjumlah 2770 hektar.⁶ Hutan rawa gambut yang berada di desa tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan rawa gambut yang berada di bentangan Kerumutan landscape.⁷ Ekosistem hutan rawa gambut ini menjadi penyangga kehidupan masyarakat Desa Pungkat dan desa-desa sekitarnya. Hutan menyediakan cadangan air bersih bagi masyarakat ketika musim kemarau. Air yang tersedia di hutan rawa gambut Desa Pungkat disebutkan salah seorang warga yang bernama Asmar mempunyai kualitas dan kejernihan yang lebih baik dibandingkan sumber air di wilayah lain di Kecamatan Gaung. Namun keberadaan sumber air masyarakat Pungkat kini hanya bisa digunakan untuk menyuci pakaian dan alat-alat rumah tangga dan mandi, masyarakat kini tidak berani lagi menjadikan air sungai untuk memasak dan minum, dikarenakan reaksi kimia dari pupuk Sawit yang

⁴ Data Penulis, diolah 2017.

⁵ Konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Konsesi antara lain diterapkan pada pembukaan tambang dan penebangan hutan.

⁶ Loc.cit

⁷ Bentangan Kerumutan Landscape berada di Kabupaten Indragiri Hulu; Indragiri Hilir dan Pelalawan.

digunakan oleh perusahaan telah membuat air sungai tercemar dan tidak bisa digunakan untuk minum dan memasak, disebutkan oleh warga ketika mereka menggunakan air tersebut untuk minum dan memasak, mereka mengeluhkan sakit pada bagian tenggorakan, sehingga masyarakat pungkat kini hanya menggunakan air galon serta air hujan yang di tampung untuk memasak dan minum.

Keberadaan hutan juga menopang nafkah hidup sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin kapal tradisional. Hutan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, seperti untuk membangun rumah dan lainnya. Penggunaan kayu alam oleh pengrajin kapal dilakukan secara selektif dengan cara tebang pilih. Kondisi ini memperlihatkan posisi penting hutan bagi kehidupan masyarakat.

Gambar 4.1 Pengrajin kapal



Sumber: Data Penulis 2016.

Gambar tersebut menunjukkan keahlian masyarakat Pungkat dalam pembuatan kapal yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian mereka. Keahlian pembuatan kapal ini sudah terjadi turun temurun dari nenek moyang mereka, bahkan kapal buatan masyarakat pungkat sudah sampai diekspor hingga Pulau Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Kapal buatan mereka sudah terkenal kualitasnya di seluruh Kecamatan Gaung, dan menjadi salah satu yang terbaik diantaranya.⁸

Hasil bumi yang dihasilkan desa pun cukup melimpah, selain ahli dalam pembuatan kapal tradisional, hasil dari perkebunan kelapa dan pinang mereka pun menjadi sumber rezeki masyarakat Pungkat. Dalam sebulan, perkebunan kelapa mereka bisa menghasilkan sampai 15.000 butir kelapa, bukan angka yang kecil untuk perkebunan yang tidak memakai pupuk kimia dalam setiap perawatannya, karna perekebunan kelapa dikelola secara ramah lingkungan oleh masyarakat.

Gambar 4.2 Pengolahan Kelapa di Desa Pungkat



Sumber: Data Penulis, 2016.

⁸ Data Penulis, diolah 2017.

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana proses pemisahan kulit kelapa dengan isi dari kelapa, setiap butir kelapa yang akan dijual tidak langsung dijual utuh ke pabrik, melainkan harus dikupas dulu dari kulitnya. Selain keahlian masyarakat Pungkat dalam pembuatan kapal, mereka juga mengandalkan sektor perkebunan untuk kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah perkebunan kelapa. Namun sejak kedatangan PT. SAL ke hutan desa mereka, produksi perkebunan kelapa mereka kini makin lama makin menurun, dalam satu bulan sebelum kehadiran PT.(SAL) perkebunan kelapa mereka mencapai 15.000 butir, namun ketika PT.(SAL) mulai beroperasi di hutan Desa, mereka hanya bisa menghasilkan 5000 sampai 6000 butir perbulan.⁹

4.2. Profil Gerakan Perempuan Pungkat

Dalam fakta yang terjadi dilapangan, terbentuknya Gerakan Perempuan Pungkat di dasari ketika para suami dari perempuan Pungkat di tangkap paksa oleh kepolisian Daerah Indragiri Hilir, karena telah membakar alat berat milik PT. SAL, total ada 21 orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian tanpa prosedur yang benar. Perempuan di Desa Pungkat akhirnya membentuk sebuah organisasi Gerakan Perempuan Pungkat Bersatu, untuk menuntut hal tersebut, juga untuk melindungi hutan mereka dari kerusakan. Organisasi ini pun di bentuk oleh beberapa perempuan Pungkat, aktor penting dalam gerakan ini adalah Cik Masniar, dan Cik Hernawati. Mereka merupakan perempuan yang menginisiatif gerakan perempuan yang ada di Pungkat.

⁹ Data Penulis, diolah 2017.

Dalam setiap aksi yang dilakukan oleh Perempuan dan masyarakat Pungkat, pasti akan menghabiskan dana yang tidak sedikit, biasanya masyarakat selalu mengumpulkan dana yang dipakai untuk setiap aksi yang akan mereka lakukan. Dana ini didapatkan secara iuran sukarela dari masyarakat Pungkat, tanpa ada paksaan apapun untuk mendukung kebutuhan gerakan. Seperti saat aksi di depan Kantor Pengadilan Negeri Kota Tembilahan saat menghadiri sidang para suami mereka yang ditangkap paksa oleh Kepolisian setempat tanpa prosedur yang jelas, para perempuan dan masyarakat pungkat datang dan melakukan aksi langsung di tempat tersebut. Sekitar ratusan orang warga pungkat datang menggunakan *boat* yang mereka sewa dari dana sukarela yang mereka kumpulkan.

Gambar 4.3 Persiapan Perempuan Pungkat Sebelum Aksi



Sumber: Jikalauhari.or.id 2017.

Gerakan Perempuan Pungkat pun terus berkembang berkat pengaruh serta bimbingan dari *Non Governmental Organization* (NGO) khususnya di Provinsi Riau yang berkonsentrasi di perlindungan lingkungan hidup, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau (WALHI), Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI), dan masih banyak yang turut mendukung serta membimbing gerakan ini. Diluar itu semua, hal ini juga turut membantu masyarakat dalam proses advokasi, dan lembaga-lembaga tersebut juga turut mengkampanyekan aspek keadilan ekologis kepada masyarakat Pungkat, juga menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.¹⁰

4.3. Profil PT. SAL dan kronologis Kedatangannya ke Desa Pungkat

PT. SAL sendiri merupakan perusahaan berbasis hutan tanaman industri yang terfokus kepada perkebunan kelapa sawit. Pada tanggal 30 Mei 2012, Sulaidy Direktur PT. SAL mengajukan permohonan izin lokasi untuk perkebunan sawit seluas 20.000 hektar meliputi Desa Simpang Gaung, Belantaraya, Pungkat, Teluk Kabung, Lahang Hulu di Kecamatan Gaung kepada Kepala Badan Perizinan, Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BP2MPD) Kabupaten Indragiri Hilir.¹¹ Yuspik, Kepala (BP2MPD) atas nama Bupati Indragiri Hilir, pada 1 Agustus 2012, menerbitkan pemberian izin lokasi perusahaan untuk perkebunan sawit di Kecamatan

¹⁰ Data penulis diolah, 2017.

¹¹ Ali, Made. 2015, *Perusahaan Babat Hutan Gambut, Duka bagi Warga Pungkat*, <http://www.mongabay.co.id/2015/06/06/perusahaan-babat-hutan-gambut-duka-bagi-warga-pungkat/> Diakses pada, 8 Januari 2018, Pukul 00.09.

Gaung. Namun PT. SAL juga wajib mengajukan pelepasan kawasan hutan ke Kementerian Kehutanan.¹²

PT. SAL selanjutnya mengajukan surat kepada Kementerian Kehutanan pada November 2012, tentang laporan identifikasi lahan areal yang akan digunakan oleh PT. SAL. Balasan Direktur Jenderal Planologi,¹³ 17 Desember 2012, bahwa hasil telaahan PT. SAL ternyata masuk Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) revisi III pada lahan gambut dengan fungsi Hutan Produksi Konversi (HPK).¹⁴ Anehnya, hasil identifikasi tim Balai Besar dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, menyebut areal PT. SAL merupakan tanah mineral berdasarkan klasifikasi menurut *Soil Taxonomy*.¹⁵ Faktanya, lahan yang berada dalam kawasan yang akan digunakan untuk PT. SAL itu adalah kawasan gambut dalam.

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit dalam lampirannya mengenai kriteria penggunaan lahan gambut secara tegas disebutkan bahwa areal gambut yang dapat dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit adalah areal gambut yang ketebalannya di bawah tiga meter.¹⁶ Selain bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, larangan penggunaan gambut yang kedalamannya lebih dari tiga meter juga diatur dalam beberapa peraturan lainnya,

¹² Loc.cit

¹³ Planologi adalah ilmu yang mempelajari sebuah wilayah atau kota beserta unsur yang ada didalamnya.

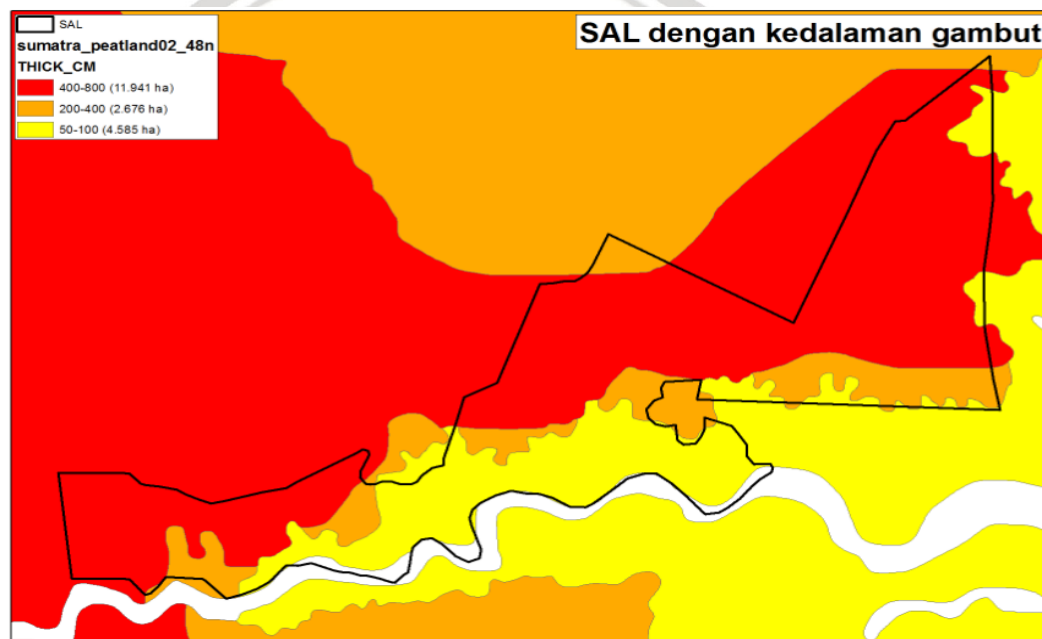
¹⁴ (HPK) adalah Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian dan perkebunan.

¹⁵ *Soil Taxonomy* merupakan ilmu dalam klasifikasi terbentuknya tipe-tipe tanah.

¹⁶ Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/PL.110/2/2009, tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit.

seperti Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa kawasan bergambut termasuk dalam kawasan lindung dan hal ini senada dengan yang diatur dalam pasal Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.¹⁷

Gambar 4.4 Lokasi PT. SAL di Areal Gambut Dalam



Sumber: Data Walhi Riau. 2015.

Dalam penjelasan gambar tersebut, garis hitam merupakan luas areal dari PT. SAL, sedangkan lahan yang berwarna merah merupakan areal gambut yang memiliki kedalaman 4 sampai 8 meter yang luasnya mencapai 11.941 hektar. Lahan berwarna oren merupakan lahan gambut yang memiliki kedalaman 2 sampai 4 meter, dengan luas lahan seluas 2.676 hektar. Sedangkan lahan yang berwarna kuning, merupakan

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

lahan gambut yang memiliki kedalaman setengah meter sampai 1 meter dengan luas lahan 4.585 hektar.

Berdasarkan data temuan dari Walhi Riau, memperlihatkan bahwa keseluruhan areal perkebunan PT. SAL merupakan kawasan gambut. Dari tampilan peta sebaran gambut yang di *overlay* dengan peta areal Izin Usaha Produksi (IUP) Kelapa sawit PT. SAL, diketahui bahwa areal perkebunan tersebut sebagian besar berada di areal gambut dalam.¹⁸

Penerbitan Izin lokasi pada tahun 2012 dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada tahun 2013 kepada PT. Setia Agrindo Lestari PT. SAL oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir di atas hamparan kawasan hutan rawa gambut dan ruang kelola rakyat ditanggapi dengan reaksi penolakan oleh masyarakat. Penolakan tersebut tidak menghalangi PT. SAL untuk tarsus beraktivitas di Pungkat. Pada sekitar bulan Maret 2014, PT. SAL telah melakukan aktivitas pembangunan kanal dan penebangan. Aktivitas ini sebenarnya bertentangan dengan hukum, karena Izin Usaha Produksi (IUP) yang dimiliki PT. SAL belum dilengkapi Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan kawasan yang dieksplorasi merupakan kawasan hutan yang belum dilakukan pelepasan atau perubahan status.¹⁹

Selanjutnya, masyarakat melakukan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hilir, yang mana akhirnya Pemerintah Daerah setempat mengeluarkan rekomendasi penghentian

¹⁸ Rahman, Fandi. *Keadilan Ekologis Penguasaan dan Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Desa Pungkat*, Walhi Riau, tahun 2016.

¹⁹ Loc.cit.

aktivitas PT. SAL di Desa Pungkat. Penerbitan rekomendasi oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD ini sama sekali tidak diindahkan oleh PT. SAL, aktivitas pembangunan kanal dan penebangan di kawasan hutan tetap dilakukan. Kondisi semakin memanas karena PT. SAL melakukan proses tapal batas dan menandai areal perkebunan kelapa warga sebagai batas wilayah perkebunannya.²⁰

Beberapa warga Pungkat menyebutkan bahwa akibat aktivitas PT. SAL yang tidak merespon penolakan warga dan mematuhi rekomendasi Pemerintah Daerah mengakibatkan kemarahan warga. Pembakaran tujuh alat berat dan dua pondok kecil milik PT. SAL akhirnya tidak dapat dihindari. Akibat dari kejadian pembakaran ini, 21 orang warga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Indragiri Hilir.²¹

Pada prinsipnya, proses hukum yang dilakukan terhadap warga Desa Pungkat merupakan suatu hal yang wajar, namun proses penangkapan yang dilakukan secara berlebihan-lebihan dengan melibatkan hampir 300 orang aparat kepolisian. Selain itu, tindakan penangkapan, penahanan dan penggeladahan yang dilakukan oleh Kepolisian amat disesalkan karena proses tersebut tidak disertai surat perintah dan menggunakan cara-cara kekerasan.²²

Asmar salah seorang tokoh di Desa Pungkat menambahkan, bahwa kejadian tersebut mengakibatkan dua orang warga Pungkat mengalami gangguan psikologis berat, keadaan traumatik bagi masyarakat Desa, kerusakan beberapa rumah warga dan

²⁰ Data penulis diolah, 2017.

²¹ Loc.cit.

²² Walhi Riau, Laporan Dari Desa Pungkat, *Masyarakat Desa Pungkat Diintimidasi oleh Polres Inhil*, Agustus 2017.

terhentinya aktivitas sekolah. Tindakan yang berlebih-lebihan dan tidak sesuai prosedur yang dibuat oleh warga membuat PT. SAL berada di atas angin dan membuat korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini pada 9 Oktober 2014 memasukkan alat beratnya kembali dan melakukan aktivitas penebangan.²³



²³ Loc.cit

BAB V

HASIL PENELITIAN

Gerakan yang diusung oleh perempuan Pungkat diawali dari aksi protes mereka terhadap Kepolisian Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah menangkap 21 orang laki-laki Pungkat dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti tidak adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu, hingga merusak rumah penduduk. Alasan dari pihak kepolisian menangkap 21 orang tersebut dikarenakan mereka telah membakar alat berat milik PT. SAL yang beroperasi di area perkebunan warga. Pembakaran tersebut bermula ketika masyarakat khawatir akan keberadaan alat berat milik PT. SAL yang berada di wilayah perkebunan desa mereka, sebagian perkebunan mereka juga sudah di tandai perusahaan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, padahal perkebunan mereka tidak masuk wilayah konsensi milik PT. SAL. Berangkat dari kekhawatiran itu masyarakat berinisiatif untuk membakar alat berat milik PT. SAL sebagai bentuk protes dengan harapan perkebunan mereka tidak tergusur oleh alat berat milik PT. SAL.¹

Selain itu kedatangan PT. SAL ke Desa Pungkat memang sejak awal tidak diterima oleh masyarakat Pungkat, alasan mereka menolak keras perusahaan kelapa sawit tersebut ialah kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Pungkat, mulai dari kehilangan sumber air bersih karna tercemarnya sungai mereka, hingga munculkan hama karna hutan desa mereka yang digusur guna pembuatan

¹ Data penulis diolah, 2016.

perkebunan kelapa sawit, sehingga hama yang tadinya berada di hutan desa kini mulai menyerang perkebunan kelapa dan pinang yang menjadi komoditas utama di Desa Pungkat.

Inisiatif Gerakan Perempuan Pungkat sendiri berasal dari dua tokoh utama Perempuan Pungkat, yakni Cik Masniar dan Cik Hernawati. Mereka merupakan dua aktor penting dalam menggerakkan Perempuan Pungkat lainnya untuk melakukan aksi protes terhadap Pemerintah Daerah. Pada perkembangannya Peran LSM juga turut membantu dalam gerakan ini, diantaranya Walhi Riau dan Jikalahari. Dari bimbingan LSM tersebut, perempuan mempunyai peran penting dalam gerakan yang dilakukan. Perempuan memiliki pengaruh dalam gerakan ini karena terlibat langsung mulai dari tahap persiapan aksi hingga melakukan aksi langsung di depan publik.

Perempuan dan alam dalam kodratnya memang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terhubung. Maria Mies menyebutkan kegiatan perempuan dalam menyediakan pangan sebagai produksi kehidupan dan memandangnya sebagai hubungan yang benar-benar produktif dengan alam, karena perempuan tidak hanya mengumpulkan dan mengonsumsi apa yang ditumbuh di alam, tetapi mereka membuat segala sesuatu menjadi tumbuh. Proses pertumbuhan secara organis, yang didalamnya perempuan dan alam bekerja sama sebagai mitra, telah menciptakan suatu hubungan khusus antara perempuan dan alam.²

² Rinoza, Renal. 2016. *Perempuan dan Lingkungan: Memahami Bumi sebagai Kerahiman; Suatu Upaya untuk Kembali Pulang ke Rahim Ibu Pertiwi*, <http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2016/04/23/perempuan-dan-lingkungan-memahami-bum>

Alam dalam pandangan perempuan Pungkat adalah sumber kehidupan, dari hutan mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari hasil perkebunan kelapa dan pinang yang menjadi komoditi besar di Desa Pungkat, hingga air yang mereka gunakan untuk minum dan memasak. Dalam pemahaman mereka tentang alam, perempuan Pungkat percaya dan yakin bahwa hutan adalah sumber kehidupan yang diberikan Tuhan terhadap manusia yang harus dijaga, tak hanya untuk masyarakat Pungkat saja, melainkan untuk semua makhluk hidup di seluruh dunia dimasa sekarang dan yang akan datang. Dari hutan manusia mendapatkan sumber oksigen yang melimpah, sumber air bersih, dan didalamnya ada beranekaragam hasil bumi dan hewani. Karena hutan merupakan aspek penting dalam kehidupan mereka, maka ketika hutan mereka rusak, itupun berdampak buruk bagi lingkungan tempat mereka. Itulah yang menyebabkan mereka bergerak aktif dalam menyelamatkan sumber kehidupan mereka. Seperti yang dikatakan Cik Masniar dalam wawancara berikut:

“Hutan ni tak hanya kami-kami saja yang nikmati, tapi kami pikir juga buat anak cucu kami, kami tak tau 10 sampai 20 tahun kedepan entah masih ada apa tidak hutan kami, selama kami hidup dekat hutan kami tak pernah sampai merusak hutan, bahkan sungai pun masih bisa kami minum airnya, kami tak mau bertahun-tahun kedepan anak cucu kami tak bisa menikmati hasil hutan lagi, hanya bisa dengar cakap orang tua mereka kalau dulu ada hutan di desa kami” (Masniar, Wawancara Pribadi, 18 Januari 2018).

Hutan memang menjadi sahabat baik bagi masyarakat pungkat, mereka juga tidak pernah merusak hutan, bahkan untuk membuat kapal, para pengrajin kapal di Pungkat hanya memilih pohon yang usianya diatas 50 tahun untuk bisa ditebang dan

[sebagai-kerahiman-suatu-upaya-untuk-kembali-pulang-ke-rahim-ibu-pertiwi/](#) diakses pada 14 Maret, 2018, pukul 15.54.

dimanfaatkan kayunya. Ini menunjukkan bahwa ketika mereka hidup berdampingan dengan alam mereka menjaga betul apa yang tersimpan didalamnya, ketika mereka menyakiti alam, itu akan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka, bahkan mereka pun masih berfikir tentang warisan yang akan dibagikan untuk anak cucu mereka, ketakutan mereka yang paling besar adalah ketika anak cucu mereka tidak bisa menikmati hutan dan hidup berdampingan dengan alam yang asri.

Kedatangan PT. SAL di hutan desa mereka memang sangat berdampak buruk bagi ekosistem desa, contoh yang paling sederhana adalah sumber air. Kedatangan perusahaan memang menyebabkan sumber air masyarakat puncak menjadi tercemar, sehingga masyarakat khususnya perempuan harus mencari sumber air lain untuk kebutuhan minum dan memasak. Perempuan menjadi salah satu makhluk yang paling merasakan kerusakan sumber air tersebut. Bagaimana tidak, air merupakan sumber daya alam yang sangat vital dalam kehidupan manusia.

5.1. Strategi Perempuan Pungkat dan Walhi dalam Menolak PT. SAL

Dengan masalah yang terjadi terhadap masyarakat Pungkat, para warga terkhusus Perempuan Pungkat pun tidak tinggal diam dengan apa yang terjadi terhadap kondisi mereka, total ada dua kelompok yang aktif menolak keberadaan PT. SAL di Desa Pungkat, mulai dari pembentukan Organisasi Rakyat Pungkat Bersatu (ORPB) hingga para perempuan pun ikut membuat Gerakan Perempuan Pungkat Bersatu, guna memberi tekanan terhadap Pemerintah Daerah serta PT. SAL bahwa mereka menolak keras keberadaan perusahaan beroperasi di wilayah Desa mereka. Hubungan antara ORPB dan Gerakan Perempuan Pungkat Bersatu adalah sebagai

aspirasi masyarakat Desa Pungkat dalam menolak PT. SAL, hanya saja ORPB lebih kepada aspirasi semua rakyat Pungkat, baik laki-laki maupun perempuan.

Seperti yang dikatakan oleh Cik Masniar,³ salah satu pendiri serta tokoh perempuan yang ada di Desa Pungkat dalam wawancara:

“Sejak PT masuk, kami sulit dapat air bersih untuk masak dan minum, kami gunakan air galon dan air hujan untuk masak dan minum, untuk cuci baju dan mandi masih pakai air sungai”. (Masniar, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2018).

Begitupun dengan Cik Hernawati, berikut hasil dari sesi wawancara yang penulis lakukan:

“Warga sini tak bisa lagi gunakan air sungai untuk masak, air galon disini kite pakai buat minum sama masak, harganya Rp. 15.000 per galon, kalau air galon habis, pakai air hujan yang kami tampung di drum depan rumah. Kami tak berani pakai air sungai untuk masak sama minum, sakit tenggorokan kami dibuatnya”. (Hernawati, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2018).

Perempuan dan masyarakat Pungkat dalam hal ini memang memerlukan bantuan dari lembaga lain untuk membantu kasus mereka, hal ini pun membuat masyarakat dan perempuan Pungkat menceritakan kasus mereka ke Walhi Riau untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut dari lembaga tersebut, berikut wawancara penulis terhadap Fandi Rahman, staf dari Walhi Riau:

“Kami mendapatkan laporan tentang kasus Pungkat dari mahasiswa UIN yang kebetulan kampungnya ada di Pungkat, mereka cerita tentang keluhan masyarakat akan kehadiran perusahaan di desa mereka, seperti air sungai yang tercemar akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, hal ini yang membuat walhi berinisiatif untuk membantu masyarakat” (Rahman, Fandi. Komunikasi Pribadi, 18 Januari 2018).

³ Cik merupakan bahasa melayu yang berarti Ibu dalam bahasa Indonesia.

Walhi merupakan lembaga yang berinisiatif dalam membantu Perempuan dan masyarakat Pungkat, hal tersebut karena Walhi mendapatkan laporan dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang dimana mahasiswa tersebut mempunyai sanak saudara di Desa Pungkat. Berangkat dari laporan tersebut, Walhi mengirim anggotanya ke Desa Pungkat untuk meninjau permasalahan yang terjadi di lapangan. Setelah mengetahui asal usul kenapa masyarakat menolak keberadaan perusahaan, mereka membuat tim khusus untuk menangani kasus di Pungkat, mereka juga turut membantu masyarakat desa khususnya Perempuan Pungkat dalam melakukan aksi. Walhi Riau juga turut serta dalam memberikan arahan serta pengetahuan tentang hukum, memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan, serta hak-hak yang harusnya mereka dapatkan sebagai masyarakat Desa Pungkat. Hal ini di katakan oleh Fandi Rahman, salah satu staf dari Walhi Riau yang terlibat langsung dalam gerakan perempuan Pungkat. Berikut pernyataan Fandi Rahman dalam wawancara:

“Keterlibatan Walhi Riau dalam kasus ini memang menjadi misi dari kami sejak awal berdirinya Walhi, yaitu membimbing masyarakat untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, terutama dalam hal keadilan lingkungan”. (Rahman, Fandi. Komunikasi Pribadi, 16 Januari 2018).

Begitupun dengan Devi Indriani, staf Walhi Riau. Berikut kutipan dari wawancara yang penulis lakukan:

“Tujuan dari Walhi terlibat dalam kasus ini supaya perempuan bisa terlibat dalam advokasi aktif yang dilakukan masyarakat Pungkat terhadap perusahaan, setelah izin perusahaan dicabut, nantinya perempuan akan dilibatkan dan terlibat aktif dalam perhutanan sosial, mulai dari tahap

persiapan, pengajuan perhutanan sosial, sampai dengan tahap pengelolaan”. (Indriani, Devi. Komunikasi Pribadi, 16 Januari 2018).

Semenjak keikutsertaan Walhi dalam gerakan ini, Perempuan Pungkat memiliki pembimbing dalam gerakan yang mereka lakukan, Perempuan Pungkat memiliki pengetahuan lebih tentang apa saja tahap-tahap yang dilakukan selama melakukan aksi, mulai dari tahap persiapan, hingga tahap pelaksanaannya. Dalam tahap persiapan yang dibimbing langsung oleh Walhi, biasanya mereka selalu berkumpul mengadakan rapat untuk mempersiapkan aksi sebaik mungkin, mulai dari mempersiapkan spanduk hingga menunjuk siapa yang menjadi kordinator lapangan sampai siapa saja nanti yang akan berorasi di depan publik. Pengetahuan ini yang sebelumnya belum didapatkan oleh masyarakat dan Perempuan Pungkat, sehingga keterlibatan Walhi dalam gerakan ini tentu saja diterima sangat baik oleh Perempuan dan masyarakat Pungkat.

Senada dalam teori mobilisasi sumberdaya, McAdam menjelaskan beberapa strategi dalam gerakan sosial, hal ini secara tidak langsung juga dilakukan oleh para Perempuan Pungkat dan lembaga yang turut membantu dalam mendorong keberhasilan gerakan mereka. McAdam menjelaskan ada tiga strategi dalam mendorong keberhasilan suatu gerakan sosial, yaitu Kekuatan organisasi, pembebasan kognitif dan membuka peluang politik, hal ini telah penulis rangkum sebagai berikut:

5.1.1. Kekuatan Organisasi (*Organization Strength*)

Organization Strength, yakni (level tingkat kondisi) dimana sebuah organisasi dalam masyarakat merasa dirugikan. Dalam hal ini, ukuran dari tingkat kerugian yang dirasakan masyarakat yaitu mencakup kebutuhan hidup, keamanan, sampai kesejahteraan yang turut terganggu, sehingga masyarakat perlu melakukan gerakan untuk memulihkan keadaan mereka seperti sediakala. Semakin terorganisir suatu kelompok orang-orang dalam suatu gerakan, maka semakin besar juga kemungkinan berhasilnya suatu gerakan. Keberadaan suatu organisasi apapun jenisnya akan membangun suatu struktur dari jaringan komunikasi, dan pemimpin yang diakui. McAdam berpendapat bahwa keberadaan suatu kelompok sosial akan memungkinkan munculnya motivasi sosial dan antar personal untuk mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kelompok bersama anggota yang lainnya, sedangkan bagi anggota kelompok yang tidak mau bergabung dalam suatu gerakan, akan mendapat hukuman secara sosial.⁴

Poin-poin penting dalam aspek kekuatan organisasi meliputi beberapa hal, yaitu motivasi sosial, membangun struktur organisasi, serta memiliki pemimpin yang diakui oleh setiap anggotanya. Dalam hal motivasi sosial, tentu saja setiap warga di Desa Pungkat memiliki keinginan untuk mengembalikan lingkungan Desa, serta mata pencaharian mereka seperti sediakala, masyarakat memiliki motivasi lebih untuk sama-sama berjuang untuk mempertahankan Desa mereka, karena ketika PT. SAL

⁴ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), hal 180-182.

belum beroperasi di lingkungan desa mereka, masyarakat hidup tentram dan tidak ada lingkungan yang tercemar.

Namun dalam motivasi sosial yang dibangun masyarakat dalam setiap gerakan, masyarakat juga memerlukan struktur organisasi yang jelas dalam gerakan yang mereka lakukan, supaya gerakan yang mereka lakukan bisa terarah dan terorganisir sehingga memiliki tujuan yang jelas. Struktur tersebut meliputi siapa orang yang memimpin suatu gerakan, sampai orang yang mengelola dana untuk setiap gerakan yang dilakukan.

Selanjutnya dalam setiap gerakan, masyarakat harus memiliki pemimpin yang diakui oleh setiap anggotanya, dalam hal ini pemilihan pemimpin merupakan hasil dari musyawarah bersama yang dilakukan terhadap semua anggota untuk menghasilkan pemilihan yang adil, sehingga dalam berjalannya gerakan ini, tidak ada anggota yang tidak mengakui pemimpinnya karena sebelumnya sudah dilakukan pemilihan secara musyawarah, sehingga dalam gerakan ini tercipta kesinambungan antara anggota dan pemimpin yang akan melancarkan tujuan mereka dalam gerakan ini.

Dalam Gerakan perempuan Pungkat, tokoh utama dalam gerakan ini adalah Masniar. Beliau merupakan Perempuan Pungkat yang sangat vokal dalam menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami di setiap aksi yang mereka lakukan. Penguatan organisasi merupakan salah satu akar untuk dapat mengembangkan

organisasi ini menjadi lebih besar lagi kedepannya, sehingga apa yang menjadi cita-cita masyarakat Pungkat selama ini bisa tercapai.

Kekuatan organisasi adalah tahap awal yang digunakan untuk meluncurkan suatu gerakan ataupun aksi untuk menyuarakan keresahan yang dialami masyarakat. Motivasi sosial, menjadi salah satu faktor kekuatan organisasi tercipta, LSM di sini juga berperan dalam terciptanya kekuatan organisasi di awal gerakan muncul. Peran LSM sebenarnya sangat vital, tak jarang dalam suatu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak ketidakpahaman maupun kesalahpahaman yang terjadi sesama masyarakat yang ada didalam konflik. Peran LSM sebagai penengah, serta penyeimbang informasi untuk masyarakat, dan menjadi pemersatu untuk dapat bergerak bersama serta menyatukan visi misi yang diinginkan oleh masyarakat yang terlibat dalam konflik. Ketika satu pemahaman itu sudah terjalin, maka organisasi akan menjadi kuat didalamnya.

Terjalannya suatu hubungan yang erat dalam suatu gerakan, membuat gerakan tersebut menjadi tahu arah serta visi misi yang ada didalamnya, hal ini memudahkan ketika tokoh penting dalam gerakan tersebut mengharapkan aksi protes lanjutan yang dilakukan untuk menekan perusahaan terkait dan pemerintah untuk segera menghentikan beroperasinya perusahaan dalam hal ini PT. SAL. Berikut beberapa aksi yang dilakukan oleh Perempuan dan warga Pungkat yang telah penulis rangkum.

Gambar 5.1 Aksi Protes Perempuan Pungkat Menolak PT. SAL



Sumber: www.riauterkini.com

Gambar 5.1 terjadi ketika Perempuan dan masyarakat Pungkat memprotes aksi penangkapan terhadap 21 orang laki-laki warga Pungkat, pada 17 September 2014, Bupati Indragiri Hilir, H. Muhammad Wardan beserta rombongan melakukan kunjungan ke Desa Pungkat dalam rangka silaturahmi Bupati Indragiri Hilir dengan masyarakat di Masjid Al-Akbar Desa Pungkat. Kedatangan mereka pun disambut aksi protes oleh ratusan perempuan Pungkat yang sudah menunggu Bupati satu jam sebelum kedatangannya. Aksi tersebut meliputi orasi yang dipimpin langsung oleh Cik Masniar,⁵ dan spanduk-spanduk yang berisi tuntutan-tuntutan Perempuan Pungkat terhadap Bupati untuk mencabut izin beroperasinya PT. SAL. Hal yang dituntut perempuan Pungkat kepada Bupati adalah untuk mencabut izin PT. SAL,

⁵ Cik merupakan bahasa Melayu yang berarti Ibu dalam bahasa Indonesia.

karna banyak menimbulkan mudarat dari pada manfaat.⁶ Selain itu para Perempuan Pungkat juga menuntut atas keadilan kepada 21 warga yang ditangkap secara paksa oleh Kepolisian dan tanpa prosedur yang benar dalam proses penangkapannya.

Setelah aksi protes di Desa mereka, para Perempuan Pungkat melakukan aksi kedua setelah para suami mereka di jemput paksa oleh pihak kepolisian, pada hari senin 17 November 2014. Mereka menggunakan dana pribadi masing-masing hasil perkebunan mereka untuk pergi melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Tembilahan. Hal yang tentu saja tidak mudah untuk mencapai ke Pengadilan Negeri tembilahan, karna dari Desa Pungkat menuju Kota Tembilahan, mereka harus menggunakan *boat* kecil untuk mencapai tujuan dan juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.⁷

Namun kedatangan Perempuan dan masyarakat Pungkat ke Pengadilan Negeri Tembilahan tidak banyak mendapatkan hasil, pihak dari Pengadilan Negeri yang diwakili oleh Wakil Ketua Y. Erstanto Windiolelono, hanya merespon tuntutan Perempuan dan masyarakat Pungkat dengan hanya menanyakan pertanyaan yang tidak penting dan tujuan dari aksi yang mereka lakukan. Adapun tuntutan mereka adalah yakni tangkap oknum yang bermain di belakang layar PT. SAL, tegakkan keadilan, dan berharap Pengadilan Negeri Tembilahan tidak melakukan konspirasi hukum, serta meminta pihak penegak hukum untuk bisa transparan dalam mengusut

⁶Ezy, 2014, *Kunjungan Wardan disambut Demo Ratusan Warga Pungkat*, <http://bertuahpos.com/berita/kunjungan-wardan-disambut-demo-ratusan-warga-pungk.html>, diakses pada 7 februari 2018, pukul 11.50.

⁷ Data penulis diolah, 2017.

kasus PT. SAL. Selain itu para Perempuan dan masyarakat Pungkat juga mendesak pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk segera mencabut seluruh izin beroperasinya PT. SAL yang ada di Indragiri Hilir, serta pemerintah wajib melakukan pembelaan terhadap warganya yang tertindas di Desa Pungkat oleh oknum perusahaan kapitalis.⁸

5.1.2. Pembebasan Kognitif (*Cognitive Liberation*)

Cognitive Liberation merupakan konsep sederhana, sebelum orang-orang ikut mengambil bagian dalam suatu gerakan, para anggota yang potensial di dalam gerakan tersebut harus mengembangkan ide bahwa suatu situasi dipandang tidak adil dan kondisi ini dapat diubah melalui tindakan kolektif. Sesuatu tersebut dipandang tidak adil ketika masyarakat merasa dirugikan oleh tindakan tertentu, hal yang dirugikan bisa menyangkut keamanan, kesejahteraan, hingga kebutuhan hidup masyarakat. Mereka harus mengembangkan perasaan suatu deprivasi relatif,⁹ yakin deprivasi ini salah memutuskan bahwa tujuan mereka adalah benar, dan yakin bahwa solusi atas problem mereka bersifat struktural.¹⁰

Tokoh-tokoh potensial sebenarnya muncul sebelum gerakan ini ada, artinya dalam setiap gerakan yang akan dimulai, selalu ada beberapa tokoh yang memiliki

⁸ Mar, 2014. *Penegak Hukum Dihimbau Berhati Nurani Tangani Kasus PT SAL Vs Warga*, <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=83666&judul=Demo%20di%20PN%20Tembilahan,Pe%20negak%20Hukum%20Dihimbau%20Berhati%20Nurani%20Tangani%20Kasus%20PT%20SAL%20Vs%20Warga>, diakses pada 9 Februari 2018, pukul 20.44.

⁹ Deprivasi Relatif adalah keadaan psikologis dimana seseorang merasakan ketidakpuasan atau kesenjangan dan kekurangan yang subyektif pada saat diri dan kelompoknya dibandingkan dengan kelompok lain.

¹⁰ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), hal 180-182.

ide-ide serta gagasan untuk gerakan tersebut supaya kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Sebenarnya masyarakat sendiri dalam faktanya bisa mengetahui serta memilih secara musyawarah siapa saja yang pantas untuk menjadi aktor penting dalam setiap gerakan yang dilakukan, karna pastinya dalam setiap pertemuan antara masyarakat desa ada beberapa aktor yang menonjol dalam setiap mengutarakan ide serta gagasannya.

Pada gerakan Perempuan di Pungkat, gerakan inipun tercipta dari beberapa perempuan pungkat yang mempunyai inisiatif untuk menyuarakan keresahan yang mereka alami, hal ini juga dibantu oleh beberapa LSM yang turut memberikan masukan serta saran terhadap Ide serta gagasan mereka, sehingga menjadi nilai lebih dari gerakan yang dibuat oleh Perempuan Pungkat. Cik Masniar dan Cik Hernawati¹¹, merupakan dua Perempuan Pungkat yang aktif memberikan ide dan gagasan mereka dalam gerakan ini. Cik Masniar menyebutkan, dia beserta perempuan-perempuan yang ada di Pungkat selalu berdiskusi setiap minggu nya untuk gerakan yang mereka lakukan, menyangkut strategi untuk menolak keberadaan perusahaan.¹²

Seperti yang dikatakan Cik Masniar, diskusi yang mereka lakukan setiap minggu itu tak terlepas dari masalah yang mereka hadapi, diantaranya adalah:

1. Menyusun aksi penolakan PT. SAL.

Sebelum menyusun aksi penolakan, Para Perempuan Pungkat biasanya berkumpul terlebih dahulu untuk melakukan persiapan menjelang aksi

¹¹ Cik merupakan bahasa melayu yang berarti Ibu dalam bahasa Indonesia.

¹² Masniar, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2018.

dilaksanakan. Tentang apa-apa saja yang perlu disiapkan, seperti spanduk penolakan, serta dana dari aksi yang akan dilakukan. Dana dari aksi yang mereka lakukan, murni berasal dari warga Pungkat itu sendiri. Dana dikumpulkan melalui swadaya masyarakat masing-masing, biasanya dana dikumpulkan disaat rapat musyawarah warga sebelum aksi dilaksanakan.

Gambar 5.2 Diskusi Antara Perempuan Pungkat Menolak PT. SAL



Sumber: Jikalauhari.or.id

Gambar 5.2 merupakan perkumpulan Perempuan Pungkat dalam melaksanakan rapat pada setiap mingguya. Rapat tersebut berisikan agenda tentang aksi yang mereka lakukan, pentingnya menjaga alam, hingga meningkatkan perekonomian warga dengan membuat kerajinan tangan, yang bertujuan untuk bisa memandirikan gerakan sosial yang mereka lakukan.

Cik Masniar juga menyebutkan bahwa “Kami Perempuan Pungkat menolak keras kedatangan PT di Desa, kami akan terus perjuangkan hak-hak masyarakat Desa”. (Masniar, Komunikasi Pribadi, 13 Januari 2018). Menurut pandangannya, kedatangan perusahaan ke Desa mereka hanya untuk merampas sumber kehidupan masyarakat, dia juga menekankan agar masyarakat Pungkat jangan sampai ada yang bekerja untuk perusahaan, jangan sampai masyarakat jadi kuli di Desa mereka sendiri.

2. Gerakan Sosial Mandiri

Dari semua ide serta gagasan yang di ciptakan oleh Perempuan Pungkat serta LSM yang terlibat didalamnya, pada prinsipnya ide ini mempunyai tujuan besar untuk memandirikan gerakan yang diusung oleh masyarakat Pungkat. Mulai dari pembiayaan aksi, sampai pada tahap advokasi yang melibatkan masyarakat Desa Pungkat. Tentunya masyarakat desa tidak bisa selalu bergantung terhadap lembaga swadaya masyarakat yang ada, mereka harus bisa mandiri dalam urusan materil dan non materil. Pada akhirnya gerakan Perempuan pungkat ini akan menjadi gerakan yang berbasis mandiri, mengelola semuanya secara mandiri, dari masyarakat Pungkat, untuk masyarakat Pungkat.

5.1.3. Membuka peluang Politik (*Political Opportunities*)

Political Opportunities, adalah keselarasan antara kelompok dengan lingkungan politik yang lebih besar, seperti lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintahan. Semakin besar suatu kelompok dapat menjalin kerjasama dengan lembaga tersebut, maka semakin besar kemungkinannya untuk dapat

melakukan perubahan dalam suatu kebijakan.¹³ *Political Opportunity* merupakan aspek yang sangat penting dibandingkan dua faktor yang lainnya. Organisasi-organisasi gerakan, harus memperoleh dan menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai hasil yang signifikan.

Dalam membuka peluang politik, para perempuan Pungkat yang selama ini selalu aktif dalam melakukan gerakan, beberapa kali juga sempat beraudiensi langsung dengan Bupati Indragiri Hilir ketika aksi pertama pada tanggal 17 September 2014. Namun setelah itu, beberapa kali juga telah diadakan rapat gabungan Komisi I dan II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir bersama unsur Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta beberapa tokoh-tokoh Penting Masyarakat Pungkat pada tahun 2016 guna membuka peluang politik yang lebih besar terhadap kasus ini. Tidak hanya beraudiensi dengan Pemerintah Daerah, Perempuan Pungkat juga melakukan audiensi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait masalah yang mereka hadapi, dengan bimbingan Walhi.¹⁴

Tidak hanya melakukan audiensi terhadap pemerintah daerah, para perempuan dan masyarakat Pungkat juga terlibat aktif dalam aksi yang mereka lakukan untuk menuntut pemberhentian operasi untuk PT. SAL. Hal ini dilakukan untuk menekan pemerintah daerah maupun pusat, untuk dapat merubah kebijakan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu izin beroperasinya PT. SAL di Desa Pungkat.

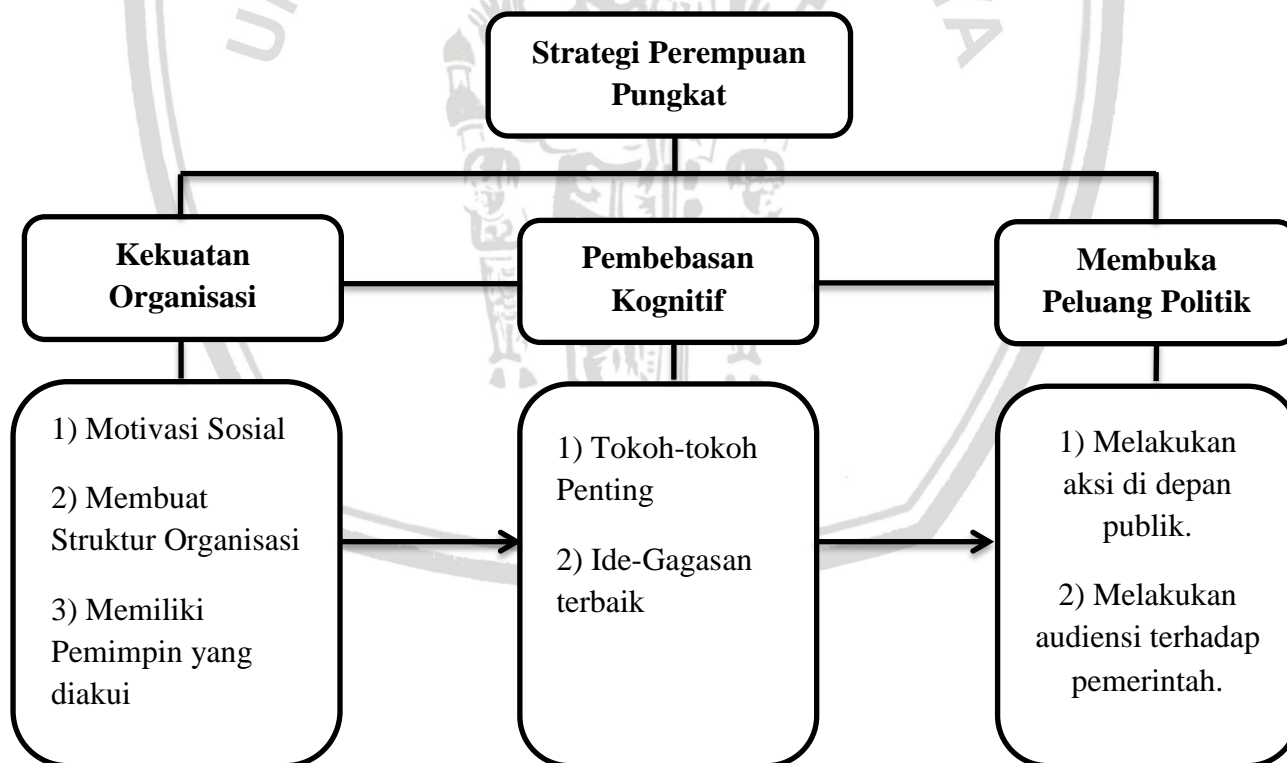
¹³ Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing), hal 180-182.

¹⁴ Data Penulis diolah, 2017.

Kesempatan politik ini harus mereka ambil untuk mencapai tujuan yang selama ini mereka inginkan.

Sama dengan gerakan sosial lainnya, tujuan umum Gerakan Perempuan Pungkat adalah kapasitasnya untuk melakukan berbagai jenis perubahan. Gerakan sosio-politik Perempuan Pungkat merupakan gerakan jangka pendek yang lebih terfokus pada perubahan kebijakan struktur agraria. Sedangkan dari segi sosio-kultural bersifat jangka panjang bertujuan untuk merubah kondisi kultur yang lebih luas dan dapat mencapai suatu identitas kolektif.

Bagan 5.1 Strategi Perempuan Pungkat Dalam Menolak PT. SAL



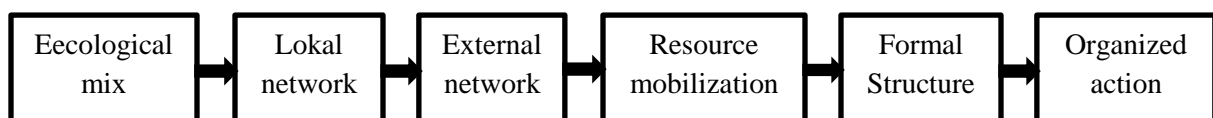
Sumber: Data Penulis diolah, 2018.

Dalam bagan 5.1 dijelaskan bagaimana rangkuman strategi yang digunakan oleh Perempuan Pungkat untuk melakukan gerakan yang dilakukan selama ini. Akar dari gerakan ini bermula dari kekuatan organisasi, motivasi sosial dari Perempuan dan masyarakat Pungkat menimbulkan gerakan ini, hal ini terjadi karena ada kepentingan masyarakat yang terganggu akan kehadiran perusahaan. Setelah itu muncul beberapa tokoh penting yang mempunyai ide serta gagasan untuk kelompok ini supaya kedepannya memiliki rencana serta visi misi yang jelas, sehingga gerakan ini memiliki target yang akan dicapai. Setidaknya ada beberapa tokoh penting di setiap gerakan, sebagai aktor penting dalam membuat strategi untuk mencapai visi misi yang telah ditentukan oleh semua anggota kelompok. Setelah dua hal tadi, akhirnya tibalah saatnya kelompok ini untuk mencoba membuka peluang politik mereka dengan cara aksi didepan publik ataupun ber-audiensi dengan pemerintah daerah guna merubah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menuntut untuk mengembalikan apa yang menjadi hak mereka selama ini.

5.1.4. Kaitan antara mobilisasi sumberdaya dan tindakan terorganisir dari masyarakat lokal

Bagan 5.2

Synthetic Model of Resource Mobilization by Local Communitie for Organized Action



Sumber: Hunter & Staggenborg, dalam Milofsky, Hal 263.

Penjelasan umum dari model ini adalah bahwa karakteristik lingkungan pada masyarakat lokal akan menghasilkan pola dan tipe jaringan lokal dan jaringan eksternal. Melalui kemampuan mobilisasi sumberdaya, kemudian jaringan lokal dan eksternal menghasilkan struktur formal masyarakat lokal. Melalui struktur formal masyarakat lokal ini, kemudian terjadi tindakan yang terorganisir pada masyarakat lokal.

Dalam hal ini yang terjadi pada gerakan Perempuan Pungkat, konflik yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat merupakan pemicu terbentuknya jaringan lokal yaitu Perempuan dan masyarakat Pungkat, dari terbentuknya jaringan lokal tersebut juga timbul beberapa jaringan eksternal yang terlibat yaitu LSM yaitu Walhi Riau. Dari peran jaringan lokal dan eksternal tersebut melalui kemampuan mobilisasi sumberdaya keduanya menghasilkan struktur organisasi yang ada di jaringan lokal, melalui struktur tersebut barulah terjadi tindakan yang terorganisir melalui gerakan perempuan pungkat ataupun masyarakat lokal.

5.2. Output dari Gerakan Perempuan Pungkat terhadap Pemerintah Perusahaan dan bagi Masyarakat Desa

Pergerakan yang dilakukan oleh Perempuan Pungkat yang dimulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, mulai membuahkan hasil. Perlahan namun pasti, suara yang mereka perjuangkan selama kurang lebih tiga tahun, mulai di dengar oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, hal ini terbukti dengan dikirimnya tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut (BRG) ke Desa Pungkat, terkait laporan yang mereka terima selama ini. walaupun pada

faktanya PT. SAL belum dicabut izin operasinya dari Hutan Desa Pungkat. Gerakan tersebut tidak hanya menghasilkan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, namun juga berpengaruh terhadap masyarakat Desa Pungkat itu sendiri khususnya para Perempuan di Desa Pungkat, para perempuan mulai sadar akan pentingnya menjaga lingkungan mereka yang tersisa, sebagian besar perempuan Pungkat juga mulai mencoba menanam tanaman yang ramah lingkungan, seperti pisang, dan nanas. Selain itu gerakan ini juga semakin mempererat hubungan antar warga yang sama-sama harus berjuang demi lingkungan mereka dan untuk mendapatkan kehidupan yang normal seperti sediakala.

Munculnya gerakan Perempuan Pungkat dikupas dari pemikiran Ekofeminisme tidak terlepas dari kegelisahan Perempuan terhadap praktek perusakan lingkungan dan ekologis yang berujung pada ketidakadilan gender. Adapun tujuan dari gerakan ini adalah untuk menata ulang keterpurukan ekologis yang dilakukan dan didominasi oleh kaum laki-laki.

Menurut D'Eaubonne, eksploitasi dan hegemonis ekspansif terhadap alam ini sejajar dengan subordinasi perempuan dalam struktur kehidupannya, baik dalam tataran sosial, ekonomi, politik dan budaya. Pandangan dunia antroposentris, yang direpresentasikan oleh dominasi maskulinitas selanjutnya dianggap menghasilkan pola pemikiran dualistik, hegemonistik dan hierarkis dalam cara memandang dunia. Ekofeminisme sendiri, merupakan aliran feminis gelombang ketiga yang menjelaskan keterkaitan alam dan perempuan, dengan titik fokus pada kerusakan alam dan

penindasan perempuan. Dalam pandangan ini, alam dianggap sebagai representasi dan simbol perempuan yang selama ini tunduk dalam dominasi laki-laki.¹⁵

Seperti yang sudah dilakukan Perempuan Pungkat, mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2017, aksi yang mereka lakukan untuk memprotes perusahaan paling tidak sudah mulai menemui titik terang. Adapun rangkuman atas aksi yang dilakukan oleh perempuan Pungkat adalah sebagai berikut:

1. Aksi pada tanggal 17 September 2014.

Pada tanggal 17 September 2014, kedatangan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir ke Desa Pungkat dalam rangka silaturahmi, disambut aksi protes warga khususnya perempuan Pungkat, terkait penangkapan suami mereka yang ditangkap secara paksa oleh Kepolisian akibat pembakaran alat perusahaan. Pada saat itu para perempuan juga memberikan opini mereka kenapa mereka menolak perusahaan untuk terus beroperasi di Desa mereka.¹⁶

2. Aksi pada tanggal 17 November 2014.

Dua bulan setelah kedatangan Bupati Indragiri Hilir di Desa Pungkat, Perempuan Pungkat kembali melakukan aksi protes mereka di Pengadilan Tinggi Negeri Tembilahan, menuntut agar suami mereka dibebaskan karena di

¹⁵Wulansari, Ica. 2017. Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme, <http://www.mongabay.co.id/2017/03/06/kendeng-dan-gerakan-ekofeminisme/>, diakses pada 27 Februari, 2018, pukul 10.31.

¹⁶Ezy, 2014, *Kunjungan Warden disambut Demo Ratusan Warga Pungkat*, <http://bertuahpos.com/berita/kunjungan-wardan-disambut-demo-ratusan-warga-pungk.html>, diakses pada 7 februari 2018, pukul 11.50.

dakwa telah melakukan tindak kriminal karena sudah membakar alat berat milik PT. SAL.¹⁷

3. Aksi pada tanggal 8 Desember 2016.

Perjuangan Perempuan Pungkat dalam memperjuangkan hutan mereka berlanjut pada tahun 2016. Pada tanggal 8 Desember 2016 Perempuan Pungkat kembali melakukan aksi protes yang ditujukan kepada Bupati Indragiri Hilir H. Muhammad Wardan, untuk mencabut izin beroperasinya PT. SAL.¹⁸

4. Aksi pada tanggal 11 Januari 2017.

Setahun setelah itu, tepatnya pada 11 Januari 2017, kembali masyarakat dan para Perempuan Pungkat melakukan aksi lanjutan untuk mendesak Pemerintah Daerah Indragiri Hilir supaya mencabut izin beroperasinya PT. SAL, aksi ini dilakukan masyarakat di depan kantor Bupati Indragiri Hilir.¹⁹

Tidak hanya aksi tersebut, perempuan pungkat juga melakukan perbaikan terhadap hutan Pungkat yang rusak akibat perluasan lahan perkebunan yang dilakukan oleh PT. SAL. Perbaikan terhadap hutan ini juga turut dibantu oleh dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir dengan memberikan bibit kayu meranti untuk

¹⁷Agustina, Rida, Ayu, 2014. *Sidang Kasus Pungkat Diwarnai Demo, PN Diminta Terapkan Azas Sebab Akibat*, <https://www.goriau.com/berita/peristiwa/sidang-kasus-pungkat-diwarnai-demo-pn-diminta-terapkan-azas-sebab-akibat.html>, diakses pada 14 Februari 2018, pukul 01.37.

¹⁸Mar, 2016. *Demo di Kantor Bupati Inhil, Warga Pungkat Desak Pencabutan Izin PT SAL*, <http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=116234&judul=Demo-di-Kantor-Bupati-Inhil--Warga-Pungkat-Desak-Pencabutan-Izin-PT-SAL>, diakses pada 14 Februari 2018, pukul 01.33.

¹⁹Chaviz, 2017. *Masyarakat Pungkat Kembali Demo Kantor Bupati*, <http://porosriau.com/inhil/Masyarakat-Pungkat-Kembali-Demo-Kantor-Bupati>, diakses pada 14 Februari 2018, pukul 01.31.

ditanam lagi oleh perempuan dan masyarakat Pungkat, guna memperbaiki kualitas hutan yang telah rusak. Bibit kayu meranti bantuan pemerintah tersebut akan digunakan untuk 100 hingga 500 hektar hutan lahan yang rusak akibat ulah dari PT. SAL.²⁰

Diharapkan dari perbaikan yang dilakukan oleh perempuan dan masyarakat Pungkat, nantinya hutan Pungkat akan membaik seperti sediakala. Tak hanya itu, perbaikan hutan juga akan berdampak kepada keseimbangan ekosistem lingkungan desa, membaiknya hutan Pungkat juga akan berpengaruh terhadap sungai gaung yang menjadi sumber air bersih masyarakat Pungkat yang berada di hilir sungai. Membaiknya kualitas hutan akan berbanding lurus terhadap kualitas air bersih yang berada di hulu sungai sehingga nantinya air bersih bukan menjadi barang langka untuk Perempuan dan masyarakat Pungkat.

Namun, dari berbagai aksi yang dilakukan perempuan dan masyarakat Pungkat dari tahun 2014 hingga 2017, setidaknya ada beberapa hasil yang perempuan dan Masyarakat Pungkat dapatkan dari kerja keras mereka selama ini, mulai dari pemberhentian sementara beroperasinya PT.SAL hingga Desa Pungkat menjadi desa panutan untuk desa lainnya yang memiliki kasus serupa, berikut rangkuman dari penulis:

1. PT. SAL berhenti beroperasi untuk sementara waktu

Tahun 2016, PT. SAL diminta berhenti beroperasi untuk jangka waktu yang

²⁰ Yudha, Ramdhana, *Pada Tahun Anggaran 2015 Mendatang Pemkab Inhil Tanam 100 Hektar Pohon Meranti*, <http://pelitariau.com/berita/detail/1770/pemkab-inhil-tanam-100-hektar-pohon-meranti.html>, diakses pada 18 Mei, 2018, pukul 03.43.

tidak ditentukan. Hal ini terjadi atas berbagai aksi protes yang dilakukan Masyarakat dan Perempuan Pungkat. Sepanjang tahun 2014, ratusan warga dan Perempuan Pungkat mengadu ke Bupati, dan DPRD. Hasilnya, pada tahun 2016, lembaga ini memenuhi tuntutan warga agar PT. SAL menghentikan kegiatan sementara waktu. Hal ini tertulis dalam Rapat Gabungan Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, tentang Evaluasi Perizinan Perusahaan Perkebunan PT. Surya Dumai Group/ Setia Agriando Jaya Group, adapun perusahaan yang tergabung afiliasi grup perusahaan ini termasuk di dalamnya PT. SAL.²¹

2. Aksi Perempuan dan masyarakat Pungkat terdengar oleh Pemerintah Pusat

Pada 24 Januari 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut (BRG), mengirim tim mereka ke Desa Pungkat, terkait laporan kerusakan hutan lahan gambut di Desa tersebut. Ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah pusat terhadap kerusakan lahan gambut di Indonesia. Dengan datangnya tim dari KLHK di Desa Pungkat, KLHK menjadikan Provinsi Riau sebagai lokasi pantauan khusus terkait kejahatan lingkungan. Kedepannya bukan hanya Desa Pungkat saja yang akan diawasi terkait pelanggaran lingkungan, namun setiap daerah di Indragiri Hilir kini lebih bisa terpantau jika ada pelanggaran serta kejahatan lingkungan.²²

²¹Rapat Gabungan Komisi I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Evaluasi Perizinan Perusahaan Perkebunan PT. Surya Dumai Group/Setia Agrindo Jaya Group, tahun 2016.

²² Mar, 2017. *Tim KLHK dan BRG Cek Kerusakan Lahan Gambut Areal PT SAL di Pungkat, Inhil.* <http://www.riauterkini.com/lingkungan.php?arr=117793&judul=Tim%20KLHK%20dan%20BRG%20Cek%20Kerusakan%20Lahan%20Gambut%20Areal%20PT%20SAL%20di%20Pungkat,%20Inhil>, Diakses pada 14 Februari 2018, pukul 22.06.

3. Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA), turut mendukung Aksi masyarakat dan Perempuan Pungkat.

Sepanjang tahun 2017, Perempuan Pungkat terus berkoordinasi dengan Walhi Riau, tentang perkembangan kasus yang sedang mereka hadapi. Akhirnya pada tahun 2017, Walhi Riau bersama perwakilan dari Perempuan Pungkat Cik Hernawati, berangkat ke Jakarta untuk menemui Tim dari Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA), untuk memberikan alasan kenapa warga Pungkat menolak keberadaan PT. SAL di Desa mereka. Akhirnya kedatangan mereka di Jakarta pun disambut baik oleh Tim (PPKA), selanjutnya Tim (PPKA) akan menindak lanjuti laporan yang mereka sampaikan. Diantaranya akan melakukan pengkajian ulang atas perizinan yang diperoleh PT. SAL, untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bupati Indragiri Hilir serta Badan Pertanahan.²³

4. Desa Pungkat menjadi Panutan atas Desa lainnya yang memiliki kasus serupa

Dari tahun 2014 hingga 2017 perjuangan Perempuan serta masyarakat Pungkat untuk mempertahankan hutan Desa mereka memang tidak bisa dikatakan mudah, namun sedikit demi sedikit perjuangan mereka mulai menampakkan hasil. Sebenarnya banyak Desa di Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai kasus yang sama, namun fakta yang terjadi di lapangan, masyarakat di Desa Belantaraya, Simpang Gaung, dan Sungai Rawa masih terkesan tidak peduli

²³ Azhar Saputra. 2017. *Perjuangan Warga Desa Pungkat Melawan PT SAL Temui Titik Terang* <http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/10/02/perjuangan-warga-desa-pungkat-melawan-pt-sal-temui-titik-terang>, diakses pada 14 Februari 2018, pukul 19.16.

dengan apa yang terjadi di lingkungan Desa mereka. Seperti yang dikatakan oleh Fandi Rahman staf Walhi Riau, Desa Pungkat menjadi panutan diantara banyak Desa di Kecamatan Gaung, Desa ini menjadi inspirasi Desa lainnya untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Desa mereka, termasuk Desa Belantaraya yang kini mulai takut kehilangan mata pencaharian mereka akibat hama yang semakin lama merusak perkebunan mereka, akibat rusaknya hutan Desa karena perluasan lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.²⁴

5. Relasi kuat Perempuan dan Alam

Dalam berbagai bentuk aksi yang dilakukan oleh Perempuan Pungkat, secara tidak langsung sebenarnya apa yang mereka lakukan selama ini dalam memperjuangkan lingkungan adalah bentuk alamiah mereka sebagai perempuan. Perempuan dalam kodratnya memang tidak bisa dilepaskan dari urusan domestik, seperti memasak, mencuci dan urusan rumah tangga lainnya. Dalam budaya melayu yang sangat erat kaitannya dengan Agama Islam, perempuan sangat di istimewa dalam segala urusannya, sehingga derajatnya lebih tinggi dari pada laki-laki. Namun begitu, perempuan tidak bisa lepas dari urusan rumah tangga yang mengharuskan mereka untuk tidak memiliki banyak kesempatan dalam urusan diluar zona domestik.

Namun begitu dalam gerakan ini, perempuan Pungkat dengan bimbingan LSM yang ada, memberikan kesempatan kepada Perempuan Pungkat, untuk mengutarakan ide serta gagasan mereka untuk turut berpartisipasi dalam gerakan menolak keberadaan PT. SAL yang semakin lama, semakin banyak mudarat yang di

²⁴Rahman, Fandi. Komunikasi Pribadi, 16 Januari 2018.

dapatkan oleh masyarakat Pungkat. Perempuan Pungkat, dalam gerakannya secara tidak langsung terinspirasi dari gerakan Chipko di India dengan gerakan memeluk pohon yang menjadi inspirasi besar dari gerakan Ekofeminisme di seluruh dunia.

Fenomena rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi terhadap alam membuat kaum perempuan resah akan tindakan dominasi kaum maskulin yang terlalu besar, sehingga timbulah teori perlindungan alam oleh kaum perempuan yaitu Ekofeminisme. Ekofeminisme memandang adanya suatu hubungan erat antara perempuan dan alam yang dilandaskan pada penindasan oleh kelembagaan yang patriarki dan peran laki-laki yang terlalu dominan.

Susan Griffin dalam Ekofeminisme Alam Kultural berpendapat bahwa Ekofeminisme berusaha memperkuat bahwa sifat yang dihubungkan dengan perempuan, bukan semata-mata hasil kontruksi kultural namun juga produk dari pengalaman aktual biologis dan psikologis.²⁵ Dalam penjelasan tersebut, Susan Griffin berusaha memperkuat adanya hubungan biologis dan psikologis antara alam dan Perempuan.

Dalam kehidupan sehari-hari pada dasarnya perempuan memang menjadi orang yang paling dekat dengan alam, Maria Mies menyebutkan kegiatan perempuan dalam menyediakan pangan sebagai produksi kehidupan dan memandangnya sebagai hubungan yang benar-benar produktif dengan alam, karena perempuan tidak hanya mengumpulkan dan mengonsumsi apa yang ditumbuh di alam, tetapi mereka

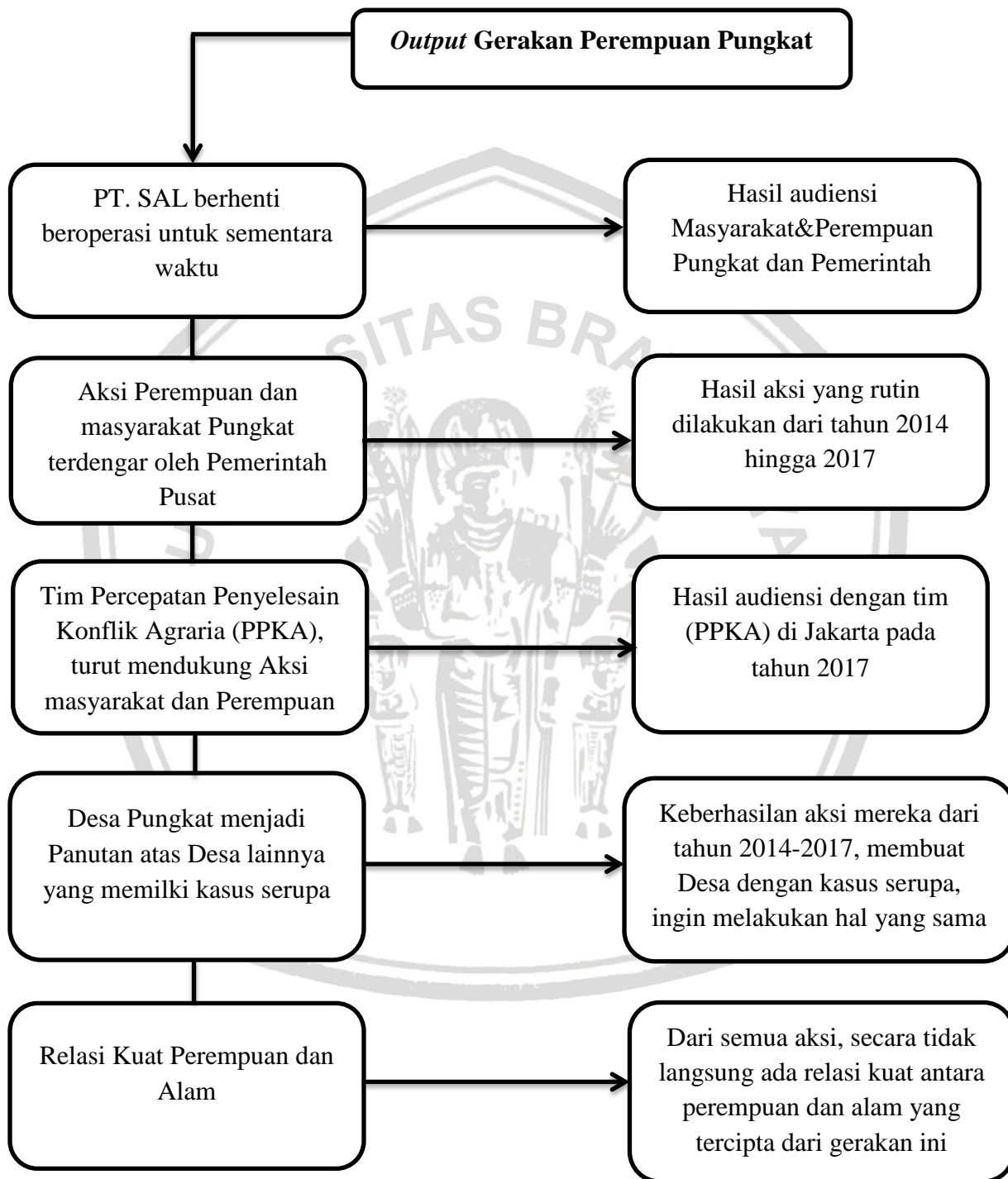
²⁵ Data diolah penulis dari Jurnal Tyas Retno Wulan, Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan, 2017.

membuat segala sesuatu menjadi tumbuh. Proses pertumbuhan secara organis, yang didalamnya perempuan dan alam bekerja sama sebagai mitra, telah menciptakan suatu hubungan khusus antara perempuan dan alam.²⁶



²⁶ Rinoza, Renal. 2016. *Perempuan dan Lingkungan: Memahami Bumi sebagai Kerahiman; Suatu Upaya untuk Kembali Pulang ke Rahim Ibu Pertiwi*, <http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2016/04/23/perempuan-dan-lingkungan-memahami-bumi-sebagai-kerahiman-suatu-upaya-untuk-kembali-pulang-ke-rahim-ibu-pertiwi/> diakses pada 14 Maret, 2018, pukul 15.54.

Bagan 5 3 *Output Gerakan Perempuan Pungkat*



Sumber: Data Penulis diolah, 2018.

Bagan tersebut menjelaskan output yang didapatkan oleh perempuan puangkat dalam aksi yang mereka lakukan dari tahun 2014 hingga 2017. Bagan tersebut menjelaskan lima poin *output* yang dihasilkan dari gerakan ini, yang pertama PT. SAL berhenti untuk sementara waktu, hal ini merupakan hasil audiensi mereka dengan pemerintah daerah yang dari rapat tersebut menghasilkan PT. SAL diharuskan berhenti untuk sementara waktu dan tidak boleh beroperasi untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Sedangkan poin kedua, aksi Perempuan dan masyarakat Pungkat terdengar oleh Pemerintah Pusat, hal ini didapatkan setelah aksi rutin yang mereka lakukan dari tahun 2014 hingga tahun 2017 sehingga berita tersebut sampai ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Restorasi Gambut (BRG) mengirim tim ke Desa Pungkat, untuk menangani kasus ini lebih lanjut.

Poin ketiga, Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (PPKA), turut mendukung Aksi masyarakat dan Perempuan Pungkat, hal ini terjadi karena Walhi dan Perempuan Pungkat melakukan audiensi terhadap tim dari (PPKA) di Jakarta pada tahun 2017, hasilnya tim dari (PPKA) menindak lanjuti laporan yang mereka sampaikan. Diantaranya akan melakukan pengkajian ulang atas perizinan yang diperoleh PT. SAL, untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bupati Indragiri Hilir serta Badan Pertanahan.

Poin ke empat, Desa pungkat menjadi Desa panutan atas Desa lainnya yang memiliki kasus serupa, hal ini tak terlepas dari keberhasilan yang mereka dapatkan berkat aksi yang dilakukan secara intens sejak 2014, sehingga beberapa desaa yang memiliki kasus serupa ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Perempuan dan masyarakat Pungkat.

Poin ke lima, Relasi Kuat Perempuan dan Alam, tidak bisa dipungkiri bahwa *output* dari gerakan ini menimbulkan relasi kuat antara perempuan dan alam. Secara tidak langsung gerakan yang mereka lakukan adalah bentuk alamiah mereka sebagai perempuan, untuk melindungi lingkungan mereka dari kerusakan. Perempuan dan alam bekerja layaknya mitra yang tidak dapat dipisahkan, sehingga jika alam rusak, maka perempuan pun menjadi manusia pertama yang akan merasakan kerusakan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian tentang Gerakan Ekofeminisme, Studi kasus Gerakan Perempuan Pungkat di Desa Pungkat, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam menolak Perusahaan Kelapa Sawit yang telah penulis teliti, setidaknya ada beberapa poin penting untuk dapat menyimpulkan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam mengatur strategi untuk meluncurkan aksi dari perempuan Pungkat, ada beberapa aspek penting dalam menyusun strategi supaya gerakan tersebut bisa berhasil, dan hal ini dijelaskan dalam pemikiran McAdam dalam Teori Mobilisasi Sumberdaya. Para Perempuan dan masyarakat Pungkat melakukan penguatan dari sisi organisasi mereka untuk membuat gerakan ini terorganisir dan terarah, sehingga tujuan dari gerakan dapat terealisasi. Begitupun dengan pembebasan kognitif, para perempuan yang memiliki ide serta gagasan, memberikan pandangan serta ide-ide mereka untuk dapat membuat gerakan ini berhasil. Peluang-peluang politik yang mereka dapatkan setidaknya untuk merubah kebijakan pemerintah dan dapat mempengaruhi pemerintah untuk memberikan keputusan yang berpihak terhadap masyarakat Pungkat.
2. Adapun output yang Perempuan Pungkat dapatkan dari gerakan ini, aksi yang mereka lancarkan selama ini dapat mempengaruhi kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat untuk dapat memberhentikan kegiatan perusahaan

sementara waktu. Selain aksi yang dilakukan perempuan juga terlibat dalam penanaman pohon yang juga didukung oleh Dinas Kehutanan Indragiri Hilir untuk mengembalikan ekosistem yang telah rusak. Perempuan Pungkat juga memiliki peranan penting dalam gerakan ini, eratnya kaitan antara perempuan dan alam dalam Ekofeminisme, menimbulkan asumsi bahwa perempuan tahu betul apa yang terjadi terhadap lingkungannya, dan perempuan tahu betul cara untuk menanganinya. Perempuan dan masyarakat pungkat mempunyai pemikiran bahwa hutan merupakan sumber kehidupan yang diberikan Tuhan tidak hanya untuk masyarakat Pungkat, tapi untuk seluruh makhluk hidup yang ada di dunia.

5.2 Saran

Dari gerakan yang dilakukan oleh Perempuan Pungkat selama ini, mereka telah melakukan gerakan yang besar dan dapat mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Namun gerakan ini masih sangat bergantung terhadap LSM yang ada, sebenarnya tidak ada yang salah dalam menggantungkan gerakan ini terhadap LSM, namun alangkah baiknya gerakan ini nantinya bisa berjalan sendiri menjadi gerakan sosial yang mandiri. Mandiri dalam artian gerakan ini dapat menjalankan berbagai aksi nya melalui pemikiran warganya sendiri, dari segi pembiayaan melalui pembuatan koperasi sendiri, sehingga nantinya gerakan ini akan menjadi gerakan yang independen dan tidak terikat oleh siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Locher, David A. 2002. *Collective Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.

Miles, Matthew B., Huberman. A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Milofsky, Carl. 1988. *Commuity Organizations: Studies in Resource Mobilizations and Exchange*. New York: Oxford University Press

Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.

Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing).

Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*, (Terj.) Yogyakarta: Resist Book.

Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique*. (New Delhi: Sage publikations India, Ltd).

Syarifuddin Jurdi, 2010, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*, (Jakarta: Prenada Media Group.

Suryani Amin, 2008. *Gerakan Sosial Petani: Studi Mobilisasi dan Perubahan Sosial Kasus Paseduluran Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) Kabupaten Batang*. Jakarta: Disertasi pada FISIP UI.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sztompka, Piotr, 2005, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group

Shiva, Vandana. 2005. *Ecofeminism; Persepektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, Yogyakarta: IRE Press.

Snow, David A. Soule, Sarah A, & Kriesi, Hauspeter (eds.). 2004. *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Triwibowo, Darmawan. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. (Jakarta:LP3ES).

Warren, K. J. 1996. *Ecological Feminist Perspective*. Indiana University Press. Blommingtoon.

Jurnal;

Curtis, Russel L, Jr. & Zurcher , Louis A, Jr. 1974. *Social Movement: An Analitical Exploration of Organizational Forms*. Sosial Problems, Vol. 21, No.3

Klandermans, Bert. 1984. *Mobilization and Participations: Social-Psycho-logical Expansion of Resource Mobilization Theory*. American Socio-logical Review, Vol. 49, No. 5.

Tyas Retno Wulan, *Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan*. Solidaty: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia. Vol. 1 No. 1, 2007.

Tindall, D. B. 2004 *Social Movement Participations Over Time: An Ego Network Approach to Micro-Mobilization*. Sociological focus. Vol. 37, No.2.

Ema Khotimah, *Pembangunan Dalam Perspektif Ekofeminisme (Analisis Kritis Paradigma Teori Pembangunan Dan Urgensi Pembangunan Perspektif Demokratis Kulturis Dalam Upaya Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Vol. 22 No. 3, 2006.

Pichardo, Nelson A. 1998. *Resource Mobilization: An Analysis of Conflicting Theorical Variations*. *The Sociological Quartely*, Vol.29, No1.

Website;

Azhar Saputra. 2017. *Perjuangan Warga Desa Pungkat Melawan PT SAL Temui Titik Terang*, <http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/10/02/perjuangan-warga-desa-pungkat-melawan-pt-sal-temui-titik-terang>, diakses pada 14 Februari 2018, Pukul 19.16

Cahyono, Budi. 2016, *Ekofeminisme*, <http://gkjlw.or.id/essay/ekofeminisme/> diakses pada 20 April 2017, pukul 23.09.

Davida W. Dana, 2013. *Perempuan dan Lingkungan*, http://wanita.sabda.org/perempuan_dan_lingkungan, diakses pada 31 Mei 2017, pukul 14.29.

Mudjia, Rahardjo. 2010. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, <http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 12 oktober 2017, pukul 20.30.

Mansata Indah Dwi Utari, 2015, *Perempuan dan Penyelamatan Lingkungan*, <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/perempuan-dan-penyelamatan-lingkungan/>, diakses pada 15 januari 2015, pukul 14.18.

Susanto, Rio. 2017. *Analisis Pelanggaran dan Pencabutan Izin PT SAL*, <http://www.walhi-riau.or.id/analisis-pelanggaran-dan-pencabutan-izin-pt-sal/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 16.25.